

**Analisis Kebijakan Arab Saudi Terkait Blokade Qatar Ditinjau Dari  
Perspektif *Decision Making***

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh**

**Ahmad Turmudzi**

**NIM: 16323079**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2019**

**Analisis Kebijakan Blokade Arab Saudi Terhadap Qatar Ditinjau Dari  
Perspektif *Decision Making***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**AHMAD TURMUDZI**

**16323079**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

**ANALISIS KEBIJAKAN ARAB SAUDI TERKAIT BLOKADE QATAR  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF *DECISION MAKING***

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat

Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

21 NOV 2019

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Pt Ketua Program Studi

Enggar Furi Herdianto S.IP., M.A)

NID. 133230101

Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1. Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A
2. Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A
3. Gustrieni Putri, S.IP., M.A



## PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

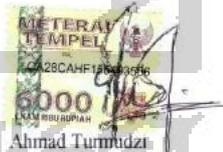
Nama : Ahmad Turmudzi  
No. Mahasiswa : 16323079  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Arab Saudi Terkait Blokade Qatar Ditinjau Dari Perspektif *Decision Making*

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 23 November 2019

Yang menyatakan

  
Ahmad Turmudzi

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ

**Karya sederhana ini saya persembahkan untuk;**

### **Ayah dan Ibu**

Terima kasih telah senantiasa berkorban tenaga, pikiran bahkan materil selama penulis menjalani studi di kampus, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas kasih sayang yang selama ini telah diberikan. Hal itu merupakan karunia terbesar yang diberikan Allah kepada penulis.

### **Adik dan Saudara**

Teruntuk adikku, Mansur dan Habib, serta saudara-saudara ku yang tak dapat kusebutkan namanya satu persatu, karya ini kupersembahkan untuk kalian. Terima kasih telah memberikan arti bagi kehidupanku, terimakasih telah bersedia untuk menemaniku dan menghiburku baik di waktu senang maupun susah.

### **Keluarga Besar Amran Family**

Teruntuk keluarga besar Amran Family, terima kasih karena telah memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepadaku, terkhusus untuk almarhum pak li, yang telah menjadi motivator dalam hidupku untuk bisa terus berjuang meraih impian

HALAMAN MOTTO

Bismillahirrahmanirrahiim

*Tarju an najaata, wa lam tasluk  
masaalikaha, inna assafiinata lan tajri  
'ala al yabas*

(Mengharapkan Sesuksesan, Namun  
tidak melalui jalannya, Sesungguhnya  
Kapal itu tidak akan berjalan diatas  
tanah)

“Don't let be fooled by stupid thoughts”

Jangan mau dibodohi dengan pikiran-  
pikiran bodoh

\*Mudzi

## PRAKATA



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraa Kaatuh*

Segala puji bagi Allah, Tuhan bagi semesta Alam yang telah memberikan kemudahan bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini, tak lupa sholawat beriringan salam selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, yang telah membawa manusia dari zama kebodohan menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Sebuah kesyukuran bagi saya selaku peneliti, karena atas rahmat dan hidayah Allah akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan. Saya menyadari bahwa dalam proses menyelesaikan penelitian ini, telah banyak pihak-pihak yang turut membantu saya, dan oleh karena itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih kepada:

1. Ayah (Drs. Rabandi) dan Ibu (Zuraida S. Ag) yang telah memberikan support berupa moril maupun materil selama penulis masih menjalani studi di UII.
2. Alm. Pak Li, paman yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi agar penulis selalu meningkatkan dan mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi.

3. Adik (Mansur dan Habib) serta saudara-saudara yang telah menghiasi hidup penulis selama ini, baik dirumah maupun dikampus.
4. Bapak Dr. H. Fu'ad Nashori S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Dr. Phil. Emi Zulaifah Dra. M.Sc. yang telah senantiasa meluangkan waktunya untuk penulis untuk berdiskusi terkait kegiatan kemahasiswaan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya.
6. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A. selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S. yang telah mengajarkan kepada penulis tentang arti kedisiplinan selama penulis menimba ilmu di prodi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia.
8. Ibu Karina Utami Dewi, S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing akademik dukungan dan memotivasi saya untuk menyelesaikan penelitian ini.
9. Mas Dr. Muhammad Zulfikar Rahmat yang telah memberikan motivasi dan dukungan serta meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan penulis terkait permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam penelitiannya.

10. Mas Geradi Yudhistira S.Sos., M.A. selaku Dewan Penguji Skripsi yang telah memberi banyak masukan kepada penulis terkait poin-poin penting yang seharusnya dimasukkan dalam Skripsi penulis.
11. Ibu Gustrieni Putri S.IP., M.A selaku Dewan Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan kepada penulis terkait bagaimana tata cara penulisan Skripsi yang baik.
12. Bapak Enggar Furi Herdianto S.IP., M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk membersamai penulis ketika ujian pendadaran.
13. Seluruh dosen Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya yang telah memberikan banyak ilmu bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
14. Seluruh karyawan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya yang telah mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
15. Segenap keluarga besar pondok moderen Gontor yang telah mendidik penulis sehingga penulis bisa menjadi seperti sekarang ini.
16. Segenap keluarga Prestisius UII yang senantiasa menjadi teman dan keluarga bagi penulis selama penulis menempuh studi di UII.
17. Dimas, Fikri, Amirul, dan Ramadha yang telah bersedia untuk menjadi penyemangat dan senantiasa menemani penulis selama penulis melakukan penelitian.

18. Teman-teman pengajar dan santriwan/wati TPA Al-Fath khususnya Emilia dan mas Jodang yang telah senantiasa mendoakan penulis sehingga penulis dimudahkan dalam mengerjakan penelitian ini.
19. Teman-teman Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya yang telah mau diajak bekerja sama dengan penulis selama penulis masih menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya.
20. Teman-teman fungsionaris Lembaga Eksekutif Mahasiswa 2017/2018, atas dedikasinya kepada penulis untuk mengajarkan bagaimana caranya berorganisasi.
21. Teman-teman fungsionaris KOMAHI 2016/2017 yang telah memberikan pengalaman berharga bagi penulis dalam hal berorganisasi.
22. Teman-teman HMI FPSB UII yang telah memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman bagi penulis selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
23. Teman-teman takmir komisariat HMI FPSB periode 2019/2020 yang telah bersedia untuk menjadi teman curhat bagi penulis dan senantiasa membantu penulis ketika dalam kesusahan.
24. Amirul Advin Mahmud yang senantiasa menjadi sahabat baik penulis dan senantiasa membantu penulis ketika sedang berada dalam kesulitan.
25. Kenny Meigar yang senantiasa menjadi teman diskusi sekaligus teman sharing penulis selama menempuh studi di UII.

26. Rifki Abror Ananda yang senantiasa menjadi teman yang menasihati dan memberikan solusi bagi penulis dikala penulis ada masalah selama kuliah.



**Analisis Kebijakan Arab Saudi Terkait Blokade Qatar Ditinjau Dari  
Perspektif *Decision Making***

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh**

**Ahmad Turmudzi**

**NIM: 16323079**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2019**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4 Signifikansi Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>1.5 Cakupan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>1.6 Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>8</b>
<b>1.7 Landasan Konsep/Teori Model.....</b>	<b>15</b>
<b>1.8 Metode Penelitian.....</b>	<b>17</b>
<b>BAB II: LATAR BELAKANG: KRISIS DIPLOMATIK QATAR DAN KEBIJAKAN BLOKADE ARAB SAUDI TERHADAP QATAR .....</b>	<b>19</b>
<b>2.1 Krisis Diplomatik Qatar .....</b>	<b>19</b>
<b>2.2 Kebijakan Blokade Arab Saudi Terhadap Qatar .....</b>	<b>26</b>
<b>2.3 Dampak-Dampak Kebijakan Blokade Arab Saudi Terhadap     Qatar .....</b>	<b>34</b>
<b>2.3.1 Dampak Di Bidang Politik .....</b>	<b>34</b>
<b>2.3.2 Dampak Di Bidang Ekonomi .....</b>	<b>35</b>
<b>2.3.3 Dampak Di Bidang Akomodasi Dan Transportasi.....</b>	<b>37</b>
<b>2.3.4 Dampak Di Bidang Kemanusiaan.....</b>	<b>37</b>
<b>BAB III: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DITERAPKANNYA KEBIJAKAN BLOKADE QATAR OLEH ARAB SAUDI MELALUI PERSPEKTIF <i>DECISION MAKING</i> .....</b>	<b>40</b>
<b>3.1 Faktor Internal .....</b>	<b>41</b>
<b>3.1.1 Faktor Internal Kerajaan Arab Saudi .....</b>	<b>42</b>
<b>3.2 Faktor Eksternal .....</b>	<b>44</b>
<b>3.2.1 Faktor Hubungan Qatar Dengan Iran .....</b>	<b>45</b>
<b>3.2.2 Faktor Kedekatan Qatar Dengan <i>Ikhwanul Muslimin</i> .....</b>	<b>48</b>
<b>3.2.3 Faktor Dukungan dari Kawasan.....</b>	<b>51</b>
<b>BAB IV: PENUTUP DAN KESIMPULAN .....</b>	<b>53</b>

4.1. Rangkuman.....	53
4.2. Proyeksi Kedepan .....	59
4.3. Saran Penelitian .....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	61



## DAFTAR TABEL

Tabel I: Tabel Perkembangan hubungan diplomatik Qatar dengan negara-negara Teluk.....	24
Tabel II: Tabel Faktor-faktor yang mempengaruhi Arab Saudi dalam membuat kebijakan blokade terhadap Qatar.....	52



## DAFTAR SINGKATAN

DIFI	: <i>Doha International Family Institute</i>
GCC	: <i>Gulf Cooperation Council</i>
HOS	: <i>House Of Saud</i>
ICJ	: <i>International Court Of Justice</i>
ISIS	: <i>Islamic State Of Iraq and Suriah</i>
MoU	: <i>Memorandum Of Understanding</i>
UEA	: <i>Uni Emirat Arab</i>
OHCHR	: <i>Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
QNA	: <i>Qatar News Agency</i>
QE	: <i>Quantitative Easi</i>



## Abstrak

Dinamika hubungan Arab Saudi dan Qatar dari masa ke masa selalu menarik untuk dibahas. Hubungan antara keduanya sudah mulai mengalami kerenggangan sejak tahun 1990-an. Saat itu, Qatar dipimpin oleh pangeran Hamad bin Khalifa Al Thani yang pandangannya tentang masa depan Qatar berbeda dengan ayahnya yang pro terhadap Arab Saudi. Saat ini hubungan keduanya mulai renggang kembali, disebabkan oleh keberpihakan Qatar terhadap Iran dan organisasi *Ikhwanul Muslimin*. Merespon hal tersebut, Arab Saudi kemudian melakukan blokade terhadap Qatar pada sektor darat, laut dan udara yang mana fenomena ini sering disebut sebagai krisis Teluk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan blokade Arab Saudi terhadap Qatar tersebut melalui perspektif *Decision Making*. Dengan menggunakan teori diatas, penelitian ini menemukan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi Arab Saudi dalam mengeluarkan kebijakan blokade terhadap Qatar. Dua faktor tersebut adalah faktor nasional dan faktor internasional. Faktor nasional meliputi keadaan domestik Kerajaan Arab Saudi yang mendorong negara itu untuk mengeluarkan kebijakan blokade tersebut. Sedangkan faktor internasional meliputi bagaimana keadaan di lingkup internasionalnya yang dalam hal ini adalah kawasan Timur Tengah yang membuat Arab Saudi harus mengeluarkan kebijakan tersebut, dalam tulisan ini dijelaskan bahwa hubungan Qatar dan Iran dan *Ikhwanul Muslimin*.

Kata Kunci : Arab Saudi, Qatar, Blokade, *Decision Making*

## Abstract

The dynamics the of relationship between Saudi Arabia and Qatar from time to time are always interesting to be discussed. The ties between the two, however, have begun to experience estrangement since the 1990s. At present, the relationship between the two is starting to drift apart again, due to Qatar's partiality towards Iran and the Muslim Brotherhood. Responding to this, Saudi Arabia then conducted a blockade on Qatar in the land, sea and air sectors which this phenomenon is often referred to as the Gulf crisis. This study aims to analyze Saudi Arabia's blockade policy towards Qatar through the perspective of *Decision Making*. Using the theory above, this study found that there are two factors that influenced Saudi Arabia in issuing a blockade policy towards Qatar, which are national factors and international factors. National factors include the domestic circumstances of the Kingdom of Saudi Arabia which pushed the country to issue a blockade policy. While international factors include the situation in the Middle East, namely Qatar's foreign policy towards Iran and the Muslim Brotherhood.

Keywords: Saudi Arabia, Qatar, *Blockade*, *Decision Making*

# **BAB I: PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Arab Saudi dan Qatar merupakan kedua negara yang saling bertetangga antara satu dengan yang lainnya. Sebagai negara yang bertetangga keduanya tentu memiliki hubungan yang kuat, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Salah satu bukti kuat akan hubungan baik mereka adalah keikutsertaan kedua negara dalam GCC (*Gulf Cooperation Council*), sebuah organisasi yang dibentuk pada 1981 dimana anggotanya berasal dari negara-negara Teluk. Hubungan antara keduanya sangat baik pada tahun 1970-an, pada masa itu keduanya ibarat saudara yang tak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya, dimana Arab Saudi selalu membantu Qatar dalam menjalankan pemerintahannya yang saat itu dipimpin oleh Khalifa bin Hamad Al Thani, bahkan Arab Saudi sempat menjadi pelindung bagi pemerintahan Qatar secara *de Facto*. Namun, hubungan antar keduanya berubah drastis setelah Khalifa bin Hamad Al Thani yang menjabat sebagai emir dari tahun 1972-1995 menyerahkan kekuasaannya pada anak pertamanya yang juga merupakan putra mahkota dari Kerajaan Qatar yang bernama pangeran Hamad bin Khalifa Al-Thani pada tahun 1992. Pangeran ini memiliki pandangan yang berbeda dengan ayahnya terkait masa depan Qatar yang cenderung bertentangan dengan Arab Saudi (Cherkaoui, 2014). Dalam literatur lainnya disebutkan bahwa

Hamad bin Khalifa Al-Thani telah melengserkan kekuasaan ayahnya sendiri, Khalifa bin Hamad Al Thani yang saat itu tengah berlibur di Jenewa pada tahun 1995 (Prastiwi, 2017).

Ketegangan politik antara Arab Saudi dan Qatar sudah berlangsung sejak pertengahan abad 20, saat itu perseteruan antara kedua negara terpusat pada sengketa perbatasan yang melibatkan beberapa negara Teluk lainnya, seperti Bahrain dan Uni Emirat Arab. Sejak saat itu, sengketa perbatasan antara Arab Saudi dan Qatar terus berlangsung hingga kedua belah pihak menyepakati batas final mereka pada perundingan tahun 2008. Salah satu sengketa batas wilayah kedua negara yang juga melibatkan Uni Emirat Arab adalah sengketa atas wilayah Khawr al-Udayd. Wilayah ini dianggap strategis oleh Inggris untuk meneguhkan dominasinya di wilayah Teluk pasca kekuasaan Turki Usmani. Konflik antara keduanya semakin memanas setelah ditemukannya kandungan minyak dan gas di wilayah tersebut. Adapun keterkaitan antara sengketa wilayah Khawr al-Udayd yang diperebutkan oleh Arab Saudi dan Qatar dengan kandungan sumber daya alam yang ada di dalamnya dapat dilihat dari proyek pembangunan pipa minyak Dolphin yang melibatkan Qatar dan Abu Dhabi (UEA) serta pembangunan *Causeway* yang menghubungkan Qatar dengan Abu Dhabi yang melewati wilayah Khawr al-Udayd pada tahun 2006, dimana hal itu menuai kecaman serta protes keras dari Arab Saudi (Wardoyo, 2018).

Seiring berjalannya waktu, isu ketegangan politik antara Arab Saudi dan Qatar juga mengalami perubahan faktor. Jika sebelumnya isu konflik antar kedua negara dipicu oleh faktor sengketa perbatasan wilayah dan sumber daya alam, saat ini konflik antar keduanya lebih menjurus pada faktor *policy* atau kebijakan, lebih tepatnya kebijakan luar negeri Qatar yang sangat bertentangan dengan Arab Saudi. Salah satunya adalah penerimaan terhadap *Ikhwanul Muslimin* di negara tersebut. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa keberpihakan Qatar terhadap *Ikhwanul Muslimin* adalah hal yang nyata dilakukan oleh Qatar. Dapat dilihat bagaimana tokoh-tokoh *Ikhwanul Muslimin* dapat hidup dengan tenang di Qatar, salah satunya adalah Yusuf Qordhowi, seorang anggota *Ikhwanul Muslimin* yang berasal dari Mesir yang saat ini sudah memperoleh kewarganegaraan Qatar. Beliau merupakan seorang ulama Qatar sekaligus pendiri fakultas *Syari'ah* di *Qatar University* pada tahun 1961 dan sampai saat ini masih eksis, pada tahun 2008-2009, beliau hanya mengajar 257 mahasiswa yang kebanyakan berasal dari luar Qatar (Roberts, 2014).

Selain keberpihakan terhadap *Ikhwanul Muslimin*, Qatar juga terlibat dalam peristiwa *Arab Springs*, dimana negara ini mendukung penuh gerakan revolusi yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah, khususnya di Libya dan Suriah (Cahyani, 2019). Dalam rangka merespon kebijakan-kebijakan luar negeri Qatar yang dianggap telah melampaui batas tersebut, Arab Saudi dan beberapa negara lainnya yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk (*Gulf Cooperation*

*Council*) sepakat untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Akhirnya pada tanggal 5 Juni 2017, Arab Saudi bersama dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir secara tiba-tiba memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar (Cahyani, 2019, hal. 518).

Setelah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, Arab Saudi terus berupaya untuk menekan Qatar dengan kebijakan-kebijakan luar negerinya yang menyudutkan Qatar. Salah satu kebijakan luar negeri Arab Saudi yang diduga cukup merugikan Qatar adalah blokade. Kebijakan Arab Saudi ini kemudian diikuti oleh negara-negara tetangganya yang juga merupakan bagian dari *Quartet* atau anti-Qatar yang terdiri dari; Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir. Adapun bentuk dari kebijakan blokade Qatar tersebut adalah larangan bagi warga Qatar untuk menggunakan serta melintasi jalur darat, laut, serta udara dari dan ke sejumlah negara-negara tetangga, seperti Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir, Yaman, dan tentunya Arab Saudi. Tidak hanya lima negara itu saja yang melakukan blokade terhadap Qatar, Mauritius, Mauritania, Maladewa, dan Libya juga memberlakukan hal serupa terhadap negara tersebut. Kebijakan blokade ini tidak hanya berlaku di Qatar, blokade ini juga berimbas pada warga Qatar yang berada di luar negeri, seperti Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab, dimana mereka diminta untuk meninggalkan negara-negara tersebut dalam jangka waktu 14 hari sejak kebijakan tersebut diberlakukan. Tidak berhenti sampai disitu, ketiga negara tersebut bahkan melarang warga negara mereka untuk

pergi ke Qatar (Widodo, 2019). Menanggapi kebijakan Arab Saudi yang melakukan blokade terhadap negaranya, pemerintah Qatar tentunya tidak tinggal diam.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan blokade yang dilakukan oleh Arab Saudi dan beberapa negara tetangga Teluk lainnya terhadap Qatar telah membuat negara tersebut merugi senilai miliaran dolar AS. Oleh karena itu, pemerintah Qatar dikabarkan telah mengupayakan kompensasi atas kerugian yang dipicu oleh kebijakan blokade Arab Saudi dan beberapa negara Teluk lainnya terhadap dirinya (Ferida, 2017). Tidak hanya Qatar, negara-negara kuat di dunia internasional seperti Amerika Serikat, China, hingga negara-negara di Eropa juga turut merespon kebijakan blokade Arab Saudi terhadap Qatar tersebut, mereka menyerukan kepada negara-negara anggota GCC agar krisis diplomatik Qatar segera diselesaikan melalui dialog yang baik antara pihak-pihak yang terlibat. Namun faktanya belum ada diantara negara-negara tersebut yang mau mengambil tindakan khusus untuk mewujudkan agar dialog ini dapat terealisasi. Hal ini diduga kuat karena mereka (negara-negara Barat) tersebut juga terlibat dalam persaingan bisnis Teluk bersama dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang merupakan dua hegemon di Timur Tengah (Kinninmont, 2019). Besarnya pengaruh Arab Saudi di Timur Tengah menjadi alasan bagi penulis untuk mencoba meneliti lebih dalam terkait kebijakan blokade yang diterapkannya terhadap Qatar. Lebih tepatnya, penulis ingin menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Arab Saudi

mengeluarkan kebijakan blokade tersebut dengan menggunakan lensa teoritis yaitu perspektif *Decision Making* yang mampu meninjau faktor-faktor penyebab diberlakukannya kebijakan tersebut oleh Arab Saudi berdasarkan keadaan yang ada pada *unsur* domestik dan internasionalnya.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang ingin dibahas penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana Penerapan Kebijakan Arab Saudi Terkait Blokade Qatar jika ditinjau dari Perspektif *Decision Making*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kebijakan Arab Saudi terkait Blokade Qatar ditinjau dari Perspektif *Decision Making* atau lebih tepatnya menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan tersebut.
2. Untuk mengetahui dampak dari kebijakan blokade tersebut terhadap negara Qatar secara komprehensif.

#### 1.4 Signifikansi Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa Arab Saudi merupakan salah satu negara yang memiliki hegemoni terbesar di kawasan Timur Tengah, dan Qatar merupakan salah satu negara terkaya di dunia, dengan cadangan LNG (*Liquefied natural gas*) yang mencapai 900 triliun kaki kubik, Qatar menjadi eksportir LNG terbesar di dunia, selain itu penerimaan dari minyak dan gas membuat pendapatan perkapita rata-rata negara ini mencapai US\$ 100.000 per-tahun, jumlah ini jauh melampaui Amerika Serikat dan Inggris (Susilo, 2017). Tidak hanya itu, negara ini juga menghabiskan lebih dari \$120 miliar untuk infrastruktur LNG yang dimilikinya (Ulrichsen, 2014). Hal tersebut tentunya memberikan dampak positif bagi perekonomian di kawasan Timur Tengah. Saat ini keduanya tengah dilanda konflik yang berujung pada pemutusan hubungan diplomatik dan blokade yang dilakukan Arab Saudi terhadap Qatar.

Permasalahan diatas tentunya memancing para analis untuk membahas serta menganalisis terkait penyebab terjadinya konflik antara kedua negara, sekaligus faktor-faktor yang mempengaruhi Arab Saudi dalam mengeluarkan kebijakan blokade tersebut, hanya saja dari beberapa penelitian yang telah terekspos di media-media online, belum ada yang menjelaskan bagaimana kebijakan blokade Qatar tersebut dapat ditinjau dari perspektif teori dalam studi hubungan internasional. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan kebijakan blokade yang

diterapkan Arab Saudi terhadap Qatar ditinjau dari sudut pandang ilmu hubungan internasional, yaitu melalui perspektif *Decision Making*. Teori ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana suatu kebijakan dapat dibuat dengan mempertimbangkan keadaan yang ada pada *faktor internal* dan internasional.

### **1.5 Cakupan Penelitian**

Adapun pokok bahasan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini antara lain adalah; kebijakan Arab Saudi terkait blokade Qatar dan bagaimana persoalan tersebut ditinjau dari perspektif *Decision Making*. Lebih tepatnya penelitian ini mencakup bahasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan blokade terhadap Qatar pada Juni 2017, dimana krisis Teluk ini dimulai hingga September 2019.

### **1.6 Tinjauan Pustaka**

Kajian mengenai krisis diplomatik di Qatar dapat ditemukan pada artikel-artikel yang dimuat di berbagai macam jurnal internasional. Diantara sekian banyak artikel yang mengkaji tentang krisis diplomatik yang terjadi di Qatar, terdapat satu artikel yang cukup menarik untuk dibahas. Artikel tersebut ditulis oleh James M. Dorsey dengan judul *Trouble in Sport Paradise: Can Qatar Overcome the Diplomatic Crisis?* yang menganalisis tentang krisis diplomatik yang terjadi di Qatar dan kaitannya dengan dunia *Sport*

atau olahraga. Dalam artikelnya, James berpendapat bahwa kebijakan blokade yang dibuat oleh Arab Saudi dan beberapa negara Teluk lainnya terhadap Qatar akan berdampak buruk bagi persiapan Qatar sebagai tuan rumah piala dunia 2020, tentunya hal tersebut dapat dilihat dari kebutuhan Qatar yang ingin mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka menjadi tuan rumah di ajang bergengsi tersebut, diantaranya adalah impor bahan-bahan bangunan untuk membangun 8 stadion yang tentunya memakan biaya lebih mahal dari biasanya disebabkan oleh adanya blokade dari Arab Saudi dan beberapa negara Teluk lainnya (Dorsey, 2018). Pendapat yang diutarakan oleh Dorsey dalam artikelnya tersebut cukup menarik, namun sayangnya ia hanya melihat krisis diplomatik Qatar berdasarkan pada satu dampak saja, yaitu dampak dalam bidang ekonomi, sedangkan dampak krisis diplomatik pada sektor tersebut tidak seburuk seperti yang digambarkan oleh Dorsey dalam artikelnya, hal tersebut jelas karena Qatar merupakan salah satu negara terkaya di dunia, dan bahkan hingga saat ini persiapan Qatar sebagai tuan rumah piala dunia 2022 masih terus berlanjut, dan belum ada informasi bahwa piala dunia akan dialihkan ke negara lain untuk menjadi tuan rumah dalam ajang bergengsi tersebut, itu artinya krisis diplomatik yang terjadi di Qatar tidak begitu berpengaruh bagi persiapan Qatar menjadi tuan rumah pada piala dunia 2022. Pembahasan mengenai dampak krisis diplomatik

terhadap perekonomian Qatar secara lebih lanjut akan dipaparkan penulis dalam penelitian ini.

Sejalan dengan apa yang diutarakan Dorsey, Jehani juga sepakat bahwa kebijakan blokade Arab Saudi terhadap Qatar telah menimbulkan banyak dampak buruk bagi Qatar. Dalam artikelnya yang berjudul *The Impact Of The Blockade On Families In Qatar*, ia memaparkan bahwa penerapan blokade oleh Arab Saudi terhadap Qatar telah berdampak pada isu kemanusiaan di negara tersebut. Lebih jauh, artikel tersebut menggambarkan tentang bagaimana Arab Saudi dan beberapa negara Teluk yang memboikot Qatar telah melakukan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) khususnya kepada masyarakat Qatar yang berada di Arab Saudi dan negara-negara Teluk yang terlibat dalam blokade terhadap Qatar. Bagaimana tidak, masyarakat Qatar yang tinggal di Arab Saudi dan negara-negara tersebut diminta untuk meninggalkan negara mereka dan kembali ke Qatar dalam jangka waktu yang ditentukan. Selain itu blokade ini juga telah menyebabkan terjadinya perceraian antara pasangan warga negara Arab Saudi dengan warga Qatar. Perceraian tersebut terjadi karena beberapa faktor, diantaranya karena mereka takut akan mendapat hukuman atau sanksi dari negaranya jika mereka masih berhubungan dengan warga Qatar, kedua karena mereka simpati terhadap negara Qatar, dan ketiga, karena mereka percaya terhadap doktrin negara mereka mengenai negara Qatar (Jehani, 2018). Pendapat yang dipaparkan oleh Jehani dalam

artikelnnya diatas sebenarnya cukup bagus dengan menggambarkan terkait bagaimana krisis diplomatik Qatar ini berpengaruh pada kemanusiaan di Qatar, namun alangkah baiknya jika penelitian tersebut juga melihat dari sisi lainnya yaitu terkait dengan bagaimana keadaan masyarakat Arab Saudi itu sendiri, apakah mereka juga merasakan hal yang sama, dalam artian merasa bahwa krisis diplomatik ini memberikan dampak yang buruk bagi mereka atau justru sebaliknya, hal ini seharusnya dilakukan agar tidak ada ketimpangan dalam menilai suatu permasalahan. Pemaparan mengenai dampak krisis diplomatik Qatar terhadap kemanusiaan yang ada di Qatar maupun Arab Saudi akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini.

Pendapat serupa juga diutarakan oleh Agus, seorang dosen Hubungan Internasional dari Universitas Jenderal Sudirman, dalam artikelnnya yang berjudul Blokade Qatar, ia berpendapat bahwa blokade yang dilakukan Arab Saudi terhadap Qatar sangat merugikan masyarakat Qatar, terutama dalam bidang akomodasi dan transportasi, dimana blokade tersebut meliputi larangan bagi masyarakat Qatar untuk menggunakan jalur darat, laut, dan udara untuk melakukan perjalanan menuju Arab Saudi, hal ini jelas membuat masyarakat Qatar terhambat dan kesulitan untuk melakukan kegiatan mereka diluar negeri, terutama di Arab Saudi, seperti halnya umroh, haji dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan melalui jalur Qatar (Haryanto, 2017). Tidak jauh berbeda

dari keduanya, Haryanto juga cukup baik dalam memaparkan pendapatnya terkait krisis diplomatik Qatar dan dampaknya bagi aktifitas mobilisasi masyarakat Qatar secara umum, hanya saja ia kurang melihat faktor-faktor internal dari Qatar itu sendiri, bahwa sebenarnya pemerintah Qatar juga telah memperketat peraturan terkait warganya yang ingin menunaikan ibadah haji, mengingat hubungan antar kedua negara yang saat ini sedang tidak baik. Hal tersebut akan menjadi salah satu pokok bahasan yang akan dipaparkan penulis dalam penelitian ini.

Berbeda dengan ketiga pendapat diatas, Alberto Negri dalam artikelnya yang berjudul *Gulf Regional Crisis: Qatar-Saudi Arabia Rivalry, Tensions within the Gulf Cooperation Council* justru menganggap bahwa blokade yang dilakukan Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan beberapa negara Teluk lainnya telah gagal, hal ini dikarenakan adanya dukungan dari negara-negara besar terhadap Qatar seperti Turki dan Iran. Tidak hanya itu, hingga saat ini negara-negara Barat sama sekali tidak mengurangi intensitas hubungan mereka dengan Doha, bahkan beberapa negara seperti Italia telah meningkatkan intensitas hubungannya dengan Qatar. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa opini internasional lebih condong memberikan dukungan terhadap Qatar dibandingkan dengan Arab Saudi, mereka menganggap bahwa Qatar jauh lebih rasional dan koheren dalam mempertahankan kebijakannya, sementara Arab Saudi dan UEA tidak lebih hanya sekedar mengekspresikan rasa

takut dan marah mereka, belum lagi ditopang dengan ketidakmampuan mereka dalam membuktikan secara nyata terkait apa yang mereka tuduhkan ke Qatar (Negri, 2018). Pendapat Negri terkait kegagalan Arab Saudi dalam kebijakan blokade yang diterapkannya terhadap Qatar cenderung terburu-buru, ia begitu cepat dalam mengambil kesimpulan dengan mengatakan bahwa tidak masalah bagi Qatar untuk menerima boikot dari Arab Saudi, karena Qatar mendapat bantuan dan dukungan dari banyak negara seperti Turki, Iran, dan beberapa negara di Eropa tanpa meninjau kembali bagaimana keadaan Qatar sebelum negara itu terkena blokade, seharusnya sebelum mengatakan bahwa blokade Arab Saudi terhadap Qatar itu gagal, ia harus terlebih dahulu melihat keefektifan negara Qatar dalam menjalin hubungan dan melakukan kerja sama dengan negara-negara lainnya dari sebelum dan sesudah kebijakan blokade itu diterapkan oleh Arab Saudi terhadap Qatar. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba meninjau kembali terkait efektifitas negara Qatar dalam melakukan kerja sama khususnya di bidang ekonomi sebelum negara tersebut terkena imbas dari blokade yang diterapkan oleh Arab Saudi.

Adapun pendapat lainnya datang dari Joseph M. Fernandez, dalam artikelnya yang berjudul *The Qatar-Gulf crisis The attack on media freedom and the West's loss of moral authority*, ia memandang bahwa kebijakan blokade Arab Saudi terhadap Qatar merupakan sebuah ironi, dimana Arab Saudi melakukan blokade

terhadap Qatar dengan alasan bahwa Qatar telah mendukung kelompok-kelompok ekstrim, sedangkan menurut pemeriksaan secara faktual, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa HOS (*House Of Saud*) mengizinkan adanya aliran dana yang ditujukan kepada ISIS, namun Arab Saudi membantah klaim tersebut dengan sangat kuat (Fernandez, 2018). Pendapat yang diutarakan oleh Fernandez dalam artikelnya sebenarnya menarik untuk dibahas, dimana hal tersebut memberikan informasi kepada masyarakat internasional tentang siapa sebenarnya Arab Saudi, namun sama halnya seperti pendapat para analis sebelumnya, pendapat Fernandez ini hanya berlandaskan studi empiris semata dan tidak mendasarkan pendapatnya pada teori tertentu. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba untuk melihat permasalahan krisis diplomatik Qatar ini dari sisi yang berbeda, yaitu dengan menggunakan sudut pandang teoritis sebagai alat untuk menganalisis permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian penelitian diatas, disini penulis akan berupaya untuk membahas krisis diplomatik yang terjadi di Qatar dari sudut pandang yang belum pernah dibahas oleh literatur-literatur yang sudah ada. Aspek yang paling disorot dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan Arab Saudi terdorong untuk mengeluarkan kebijakan blokade tersebut yang kemudian penulis akan mencoba untuk menganalisisnya menggunakan perspektif *Decision Making*.

## 1.7 Landasan Konsep/Teori Model

Dalam penulisan karya ilmiah, seorang penulis atau peneliti tentunya membutuhkan teori untuk dijadikan landasan bagi penelitiannya. Bagi ilmuwan hubungan internasional, teori digunakan untuk menganalisis problematika yang terjadi di dunia internasional. Banyaknya teori dalam disiplin ilmu hubungan internasional membuat definisi dari teori tersebut juga beragam. Salah satu definisi teori menurut ilmuwan hubungan internasional adalah sebagai berikut; “Teori adalah observasi untuk menguji hipotesis mengenai dunia” (Burchil dan Linklater, 2009, hal. 11). Adapun teori yang dijadikan penulis sebagai landasan dalam penelitian ini adalah perspektif *Decision Making*.

*Decision Making* merupakan salah satu teori dalam ilmu hubungan internasional yang berfungsi untuk menganalisis para aktor hubungan internasional dalam membuat sebuah kebijakan. Adapun definisi dari teori ini menurut Coplin adalah sebuah cara untuk mengetahui perilaku negara dalam hubungan internasional. Coplin menambahkan bahwa, dalam membuat sebuah kebijakan seorang aktor harus memperhatikan dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal, kelompok domestik akan menekan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan mereka, lalu politisi akan melihat hal ini sebagai peluang untuk mencari kekuatan dengan membangun koalisi bersama kelompok-kelompok tersebut. Sedangkan pada faktor

eksternal, pemerintah akan berupaya untuk memaksimalkan kemampuan mereka dalam rangka untuk memenuhi kepentingan domestik, sambil meminimalisir konsekuensi yang merugikan pihak asing (Coplin, 2003). Kedua hal ini akan selalu menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan oleh aktor negara dan aktor hubungan internasional, tidak satupun diantara keduanya dapat diabaikan oleh pembuat kebijakan selama suatu negara itu masih berada dalam ketergantungan atas negara lain.

Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba untuk menganalisis kebijakan Arab Saudi terkait blokade Qatar melalui dua faktor tersebut, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal memperhatikan bagaimana keadaan domestik di Arab Saudi yang membuatnya harus mengeluarkan kebijakan tersebut. Pada faktor ini, keadaan domestik Arab Saudi yang dalam hal ini adalah Kerajaan Arab Saudi menjadi faktor utama yang mendorong negara itu untuk memberlakukan kebijakan blokade terhadap Qatar. Sedangkan faktor eksternal memperhatikan bagaimana keadaan di lingkup internasionalnya, lebih tepatnya di kawasan Timur Tengah yang memancing pemerintah Arab Saudi untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Pada faktor ini, aktor-aktor internasional di kawasan Timur Tengah merupakan penyebab utama yang mendorong Arab Saudi untuk mengeluarkan kebijakan blokade tersebut, salah satu contoh ringkas adalah hubungan antara Qatar dengan Iran yang notabene merupakan musuh bebuyutan Arab

Saudi, sehingga memaksa Arab Saudi harus melakukan blokade terhadap Qatar disebabkan oleh kedekatannya dengan Iran. Menurut Coplin terdapat empat unsur yang dapat menentukan proses dibuatnya sebuah kebijakan luar negeri. Pertama adalah politik dalam negeri suatu negara, kedua adalah pembuat keputusan itu sendiri, ketiga adalah sektor ekonomi dan militer dan keempat adalah keadaan internasionalnya (Coplin, 2003). Dalam konteks penelitian ini, penulis akan menganalisis terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Arab Saudi dalam mengeluarkan kebijakan luar negerinya berupa blokade terhadap Qatar, dimana dari keempat unsur tersebut, penulis hanya akan menggunakan dua unsur saja, yaitu politik dalam negeri Arab Saudi atau faktor internal (domestik) serta keadaan internasional di kawasan Timur Tengah atau faktor eksternal. Menurut penulis, teori ini adalah teori yang paling tepat untuk digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh aktor hubungan internasional, dimana teori ini mempertimbangkan penyebab dibuatnya kebijakan tersebut melalui dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan jenis metode kualitatif. Sebuah metode yang biasanya digunakan oleh para ilmuwan sosial. Metode kualitatif menurut (Creswell, 2008) adalah suatu

metode pendekatan atau penelusuran untuk memahami dan mengeksplorasi suatu gejala sentral (Raco, 2010, hal. 5).

#### **b. Subjek dan Objek Penelitian**

Adapun subjek penelitian ini adalah negara Arab Saudi, sedangkan objek yang diteliti adalah kebijakan blokade Arab Saudi terhadap Qatar melalui perspektif *Decision Making*.

#### **c. Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, penulis akan menggunakan sumber data sekunder sebagai rujukan. Adapun sumber data tersebut berasal dari media tertulis seperti buku, teks akademik, maupun berita-berita online yang kredibel.

#### **d. Proses Pengumpulan Data**

Dalam proses pengumpulan data, penulis akan mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk kemudian dikonsultasikan dengan dosen yang ahli di bidang tersebut.

## **BAB II: LATAR BELAKANG: KRISIS DIPLOMATIK QATAR DAN KEBIJAKAN BLOKADE ARAB SAUDI TERHADAP QATAR**

### **2.1 Krisis Diplomatik Qatar**

Ketegangan politik dalam bentuk krisis diplomatik yang terjadi di Qatar bukanlah suatu hal baru bagi negara tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2017 silam, Qatar mengalami krisis diplomatik dimana Arab Saudi dan beberapa negara Teluk lainnya memutuskan hubungan diplomatik mereka dengan Qatar. Isu pemutusan diplomatik, tersebut cukup menggemparkan dunia internasional, namun sebenarnya permasalahan diplomatik yang terjadi di Qatar pada tahun 2017 itu bukanlah suatu hal baru bagi negara tersebut.

Sejarah mencatat bahwa negara Qatar merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang paling sering terlibat dalam permasalahan diplomatik. Salah satu permasalahan diplomatik yang pernah terjadi di Qatar adalah sengketa wilayah kedaulatan dengan Bahrain yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama yaitu sekitar 65 tahun, tepatnya mulai dari tahun 1936 sampai 2001.

Adapun wilayah yang saat itu menjadi sasaran persengketaan adalah pulau Hawar, wilayah Dibal dan Al-Jaradah dan perairan teritorial Teluk Persia, dan Zubarah, sebuah daerah yang terletak di wilayah semenanjung Qatar. Persengketaan tersebut kemudian diselesaikan melalui jalan damai lewat *International Court Of Justice* (ICJ),

dimana ICJ mengumumkan bahwa penyelesaian kasus sengketa wilayah yang melibatkan kedua negara telah mencapai batas final pada 16 Maret 2001. Menurut ICJ, kasus persengketaan wilayah antara Qatar dan Bahrain ini merupakan kasus persengketaan wilayah dengan durasi waktu terlama, paling berlarut-larut, dan kasus paling kompleks yang pernah diajukan ke pengadilan internasional. Adapun resolusi yang ditetapkan ICJ dalam kasus persengketaan ini adalah dengan memberikan pulau Hawar dan Jaradah kepada Bahrain, dan menghadiahkan wilayah Zubarah, kepulauan Janan dan Al-Dibal (Wiegen, 2012). Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2014 tiga negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) yang terdiri dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain menarik duta besar mereka dari Doha, Qatar, keputusan tersebut cukup mengejutkan, karena dilakukan secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas, Muhammad Zulfikar, seorang dosen Hubungan Internasional dari Universitas Islam Indonesia berpendapat bahwa tidak ada alasan yang spesifik yang menggambarkan penyebab terjadinya penarikan duta besar oleh ketiga negara tersebut melainkan hanya sebatas untuk melindungi keamanan dan stabilitas negara mereka (Zulfikar, 2014). Sumber lainnya menyebutkan bahwa penyebab dari penarikan duta besar yang dilakukan oleh ketiga negara Teluk tersebut berdasarkan pada anggapan bahwa Qatar telah mengintervensi urusan dalam negeri mereka, lebih tepatnya ketiga negara tersebut menilai bahwa Qatar

telah gagal dalam menerapkan kesepakatan dalam perjanjian terkait keamanan yang telah ditandatangani olehnya pada tahun 2013, dimana isi dari perjanjian tersebut adalah untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota kerjasama Teluk (GCC), serta tidak mendukung media yang bermusuhan. Kegagalan tersebut dapat dilihat dari tindakan Qatar yang secara terang-terangan mendanai stasiun TV *Al-Jazeera* yang cenderung meliput berita-berita yang berisi tentang kecurigaan terhadap Arab Saudi. Sebaliknya, para pengkritik media *Al-Jazeera* yang terdiri dari negara-negara Teluk yang pro terhadap Arab Saudi justru menuduh bahwa *Al-Jazeera* sangat dekat dengan kelompok *Ikhwanul Muslimin* yang dinilai oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sebagai ancaman bagi kawasan. Sebagaimana dilaporkan oleh media kawasan, bahwa keputusan penarikan duta besar tersebut diambil melalui pertemuan para menteri luar negeri dari 6 negara Teluk yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk, GCC yang berlangsung hingga Selasa, 4 Maret 2014 pada malam hari di Riyadh (Gunawan, 2014).

Uraian diatas secara tidak langsung memberikan informasi bahwa krisis diplomatik yang terjadi antara Qatar dan negara-negara Teluk sebenarnya sudah sangat sering terjadi. Kendati begitu, terdapat sedikit perbedaan antara krisis diplomatik Qatar dengan beberapa negara Teluk yang terjadi beberapa tahun yang lalu dengan krisis diplomatik Qatar yang terjadi pada tahun 2017. Perbedaan

tersebut dapat dilihat dari isu yang diangkat dalam krisis diplomatik itu sendiri, dimana krisis diplomatik Qatar dengan beberapa negara Teluk lainnya yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu lebih banyak terpusat pada isu sengketa wilayah semata, sedangkan krisis diplomatik Qatar yang terjadi pada tahun 2017 silam yang hingga saat ini masih terus berlanjut terpusat pada isu kebijakan yang dibuat oleh Qatar itu sendiri. Salah satu kebijakan Qatar yang menjadi pemicu terjadinya krisis diplomatik pada tahun 2017 silam adalah terkait dukungan negara tersebut terhadap Organisasi *Ikhwanul Muslimin*.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberpihakan Qatar terhadap organisasi *Ikhwanul Muslimin* dengan cara menampung para tokoh-tokoh ternama dalam kelompok tersebut di negaranya telah mencederai hubungannya dengan Arab Saudi dan beberapa negara Teluk lainnya. Hal tersebut jelas, karena Arab Saudi dan Uni Emirat Arab serta beberapa negara Teluk lainnya menganggap bahwa *Ikhwanul Muslimin* merupakan organisasi teroris (AFP, 2017). Salah seorang pejabat Arab Saudi mengatakan bahwa langkah yang dilakukan oleh negara-negara Teluk terkait dengan pemutusan hubungan diplomatik yang terjadi pada 5 Juni 2017 silam tidak lain adalah untuk melindungi keamanan nasionalnya dari bahaya terorisme dan ekstrimisme, alasan serupa juga disampaikan oleh pejabat Uni Emirat Arab yang menuduh Doha sebagai donatur bagi para teroris dan organisasi sektarian (Debora, 2017). Berkat

kekayaan yang dimiliki Qatar, Arab Saudi menuding bahwa negara itu telah menggelontorkan dana sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar 13,2 triliun rupiah kepada bekas kelompok afiliasi *Al-Qaeda* di Suriah dan aparat keamanan Iran dalam rangka untuk membebaskan 26 anggota Kerajaan Qatar yang dilaporkan diculik oleh kelompok milisi Syiah sokongan Iran, namun Qatar secara tegas membantah tuduhan itu, negara tersebut menambahkan bahwa sejumlah upaya sudah dilakukan dalam rangka untuk menanggulangi terorisme. Lebih lanjut, negara itu bahkan mengatakan bahwa upaya yang dilakukannya jauh lebih keras dibandingkan negara-negara Teluk yang menuduh mereka sebagai donatur bagi teroris (Keatinge, 2017).

Hingga saat ini, krisis diplomatik Qatar dengan negara-negara anggota GCC belum menemui titik terang. Sebagai negara yang menjadi korban, Qatar terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di negaranya tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan Qatar adalah dengan meminta bantuan kepada Amerika Serikat untuk menyelesaikan permasalahan krisis diplomatik di negaranya. Merespon hal tersebut, Amerika Serikat kemudian mencari celah penyelesaian sengketa antara Qatar dan Arab Saudi melalui kesepakatan anti-terorisme, kesepakatan tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson, dan Menteri Luar Negeri Qatar Muhammad Bin Abdurrahman Al-Thani, pada 11 Juli 2017. Rex Tillerson menyatakan usai

penandatanganan MoU bahwa “Memorandum yang kami sepakati memaparkan serangkaian langkah yang akan diambil kedua negara dalam beberapa bulan dan tahun mendatang untuk mengganggu dan melumpuhkan aliran dana terhadap teroris serta mengintensifkan kegiatan kontra-terorisme secara global”. Meskipun demikian, Arab Saudi menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Qatar tersebut tidak begitu berpengaruh untuk mengakhiri krisis diplomatik di Qatar (Kertopati, 2017).

Dibawah ini adalah tabel dinamika perkembangan hubungan diplomatik antara Qatar dan negara-negara Teluk:

**Tabel I**  
**Tabel Dinamika Perkembangan Hubungan Diplomatik**  
**Qatar dan Negara-Negara Teluk**

No	Tahun	Isu
1.	2008	Qatar dan Arab Saudi mencapai kesepakatan akhir mengenai demarkasi perbatasan setelah bertahun-tahun tegang.
2.	Maret, 2014	Arab Saudi, UEA dan Bahrain menanggukkan hubungan dengan Qatar atas dukungannya terhadap <i>Ikhwanul Muslimin</i> , sebuah organisasi yang diberi label teroris oleh Arab Saudi dan Uni

		Emirat Arab.
3.	November, 2014	Arab Saudi, Uni Emirat Arab sepakat untuk mengembalikan Duta Besar mereka ke Doha, Qatar.
4.	Desember, 2016	Raja Saudi, Salman Bin Abdul Aziz Al-Saud, tiba di Doha untuk memperkuat hubungan antar kedua negara.
5.	4 Juni 2017	Terkuaknya isi dari email Yousef Al Otaiba, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Amerika Serikat yang mengungkap adanya hubungan antara Otaiba dengan sebuah kelompok pemikir pro-Israel di Washington, bersamaan dengan upaya untuk melemahkan citra Qatar.
6.	5 Juni 2017	Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar.

Table I (Debora, 2017).

Arab Saudi merupakan negara yang memiliki pengaruh paling besar dalam krisis diplomatik yang terjadi di Qatar saat ini, oleh karenanya, penting rasanya untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kebijakan blokade yang diterapkan Arab Saudi terhadap Qatar tersebut. Atas dasar itu, dibawah ini penulis akan memaparkan

terkait gambaran dari kebijakan blokade Arab Saudi terhadap Qatar tersebut.

## **2.2 Kebijakan Blokade Arab Saudi Terhadap Qatar**

Krisis diplomatik Qatar 2017 tidak berhenti pada keputusan diplomatik yang dilakukan oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir terhadap Qatar. Lebih dari itu, Arab Saudi dan beberapa negara Teluk tersebut juga menambahkan penderitaan terhadap Qatar dengan mengeluarkan kebijakan blokade terhadapnya. Kebijakan blokade tersebut merupakan salah satu bentuk nyata dari gejolak perpolitikan yang kerap kali terjadi di Timur Tengah, Abdullah Baabood, seorang guru besar di bidang studi politik Teluk mengatakan, bahwa gejolak politik yang terjadi di Timur Tengah merupakan ciri khas yang ada pada kawasan tersebut, dengan besarnya gejolak politik yang terjadi, tidak mengherankan jika negara-negara di Timur Tengah termasuk negara-negara Teluk itu sendiri selalu berupaya untuk menguatkan pertahanan mereka dari ancaman-ancaman politik, ekonomi dan sosial yang mungkin akan terus meningkat sewaktu-waktu, tidak terkecuali Qatar, kebijakan blokade yang dilakukan oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir terhadap dirinya saat ini adalah contoh nyata dari gejolak politik yang menimpa negara tersebut sekaligus ujian bagi Qatar untuk bisa bertahan dalam keadaan yang dihadapinya (Baabood, 2017).

Kebijakan tersebut dikeluarkan tepat setelah mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada 5 Juni 2017 silam. Adapun maksud dari kebijakan blokade yang diterapkan oleh Arab Saudi dan beberapa negara Teluk tersebut berupa larangan bagi warga Qatar untuk berpergian ke negara mereka. Arab Saudi bersama dengan UEA dan Bahrain memboikot seluruh jalur transportasi yang menghubungkan antara Qatar dan negara-negara Teluk tersebut baik melalui jalur darat, laut, serta udara (Jahsan, 2018). Arab Saudi dan beberapa negara Teluk lainnya yang melakukan blokade terhadap Qatar menganggap bahwa Qatar merupakan negara semenanjung yang menjadi sponsor bagi kelompok-kelompok teroris, mereka juga menambahkan bahwa Qatar telah melakukan pengkhianatan terhadap negara-negara anggota *Gulf Cooperation Council* (GCC), hal tersebut disebabkan oleh kedekatan Qatar dengan Iran yang mereka anggap sebagai ancaman bagi stabilitas keamanan negara-negara Teluk (Harb, 2018).

Hingga saat ini, penerapan blokade yang dilakukan oleh Arab Saudi dan beberapa negara Teluk lainnya terhadap Qatar masih terus berlanjut, hal ini tentunya sangat merugikan Qatar dari berbagai aspek yang diantaranya adalah politik, ekonomi, bidang transportasi dan akomodasi dan kemanusiaan. Situasi yang semakin rumit ini kemudian menuai tanggapan dari berbagai pihak yang ingin turut andil dalam penyelesaian masalah blokade tersebut,

beberapa diantaranya mengecam tindakan dari keempat negara tersebut terhadap Qatar dan menganggap bahwa tindakan blokade tersebut telah melampaui batas bahkan telah melanggar Hak Asasi Manusia. Anggapan seperti itu salah satunya datang dari salah satu badan PBB, yaitu *Office Of The United Nations High Commissioner For Human Rights* (OHCHR) yang menuliskan dalam laporan mereka bahwa kebijakan blokade yang diberlakukan oleh Arab Saudi dan ketiga negara lainnya dapat berpotensi pada pelanggaran HAM bagi warga Qatar. Tidak hanya itu, OHCHR juga menambahkan dalam laporannya bahwa tindakan yang dilakukan oleh Arab Saudi dan ketiga negara tersebut merupakan hal yang diskriminatif dan tidak memiliki dasar hukum untuk melemahkan perekonomian negara. Laporan PBB juga menilai bahwa blokade yang dilakukan oleh keempat negara tersebut dilakukan secara sepihak, koersif dan sewenang-wenang. Laporan tersebut kemudian menuai kecaman keras dari keempat negara tersebut, mereka menganggap bahwa hasil investigasi yang dilakukan oleh PBB tidaklah benar, tidak akurat serta berdasarkan pada tuduhan yang tidak terbukti. Lebih jauh lagi, keempat negara tersebut mengatakan bahwa OHCHR tidak memahami konteks dan alasan dari krisis diplomatik yang saat ini terjadi, sehingga memancing mereka untuk menjelaskan ulang terkait alasan mereka melakukan blokade terhadap Qatar yang salah satunya adalah berdasarkan pada keberpihakan Qatar terhadap organisasi-organisasi teroris dan

ekstrimis. Selebihnya, keempat negara tersebut juga menambahkan bahwa blokade terhadap Qatar terpaksa ditegakkan oleh mereka berdasarkan pada asas kedaulatan masing-masing negara, hal itu dilakukan demi menjaga keamanan nasional mereka (Adiyudh, 2018). Keempat negara tersebut menilai bahwa laporan yang dibuat oleh OHCHR tersebut mengandung kesalahan metodologis dan prosedural, namun anehnya mereka tidak menyebutkan dimana letak kesalahan metodologis dan proseduralnya tersebut, menurut OHCHR sendiri bahwa laporan yang mereka lakukan sudah sangat jelas dengan mencantumkan dimana lembaga tersebut didirikan serta menjelaskan sifat dari investigasi yang dilakukan (Dugard and Schabas, 2018).

Menanggapi respon-respon yang datang dari berbagai pihak, Arab Saudi bersama ketiga negara lainnya yang terlibat dalam blokade Qatar tersebut mencoba untuk merespon secara baik atas maksud dan tujuan mereka yang intinya adalah untuk mengakhiri krisis diplomatik di Qatar, Arab Saudi dan ketiga negara tersebut sebenarnya sudah mulai membuka diri agar supaya krisis diplomatik di Qatar ini segera diselesaikan dan mereka mengakhiri penerapan kebijakan blokade mereka terhadap Qatar, hanya saja *there is no such free lunch*, ungkapan itulah yang pantas dinisbatkan kepada tindakan Arab Saudi dan ketiga negara tersebut ketika ingin mengakhiri blokade mereka terhadap Qatar, dimana mereka

mengajukan 13 tuntutan kepada Qatar sebagai syarat untuk mengakhiri blokade tersebut (Saputri, 2017).

Adapun 13 tuntutan yang diajukan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir sebagai syarat untuk mengakhiri blokade mereka terhadap Qatar adalah sebagai berikut (Unit, 2017):

1. Mengurangi hubungan diplomatik dengan Iran
2. Mematikan pangkalan militer Turki di Qatar
3. Memutuskan hubungan dengan organisasi teroris serta menghentikan pendanaan terhadap organisasi tersebut baik secara kelompok maupun individu
4. Menyerahkan pembangkang dari negara Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir yang tinggal di Qatar serta membekukan aset mereka
5. Mengakhiri intervensi terhadap negara Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir melalui media Qatar
6. Membekukan media *Al-Jazeera* dan outlet media lainnya
7. Menyamakan persepsi kebijakan dengan negara-negara Teluk lainnya dan negara-negara Arab
8. Membayar reparasi dan kompensasi
9. Menyetujui tuntutan dalam waktu 10 hari
10. Adanya pengawasan total dari negara-negara Teluk terhadap Qatar
11. Bersedia membayar audit setiap bulannya selama 10 tahun kepada Arab Saudi ketika tuntutan tersebut diterima

12. Memenuhi semua tuntutan dalam waktu 10 hari, dan apabila tidak terpenuhi maka dianggap gagal dalam menjalankan syarat tersebut

13. Bersedia untuk tidak menjalin hubungan dengan Iran, tuntutan ini mencakup tiga hal yaitu:

- a. Menutup misi diplomatik Iran di Doha
- b. Mengusir anggota pengawal revolusi Iran serta menghentikan kerja sama militer dengan Taهران
- c. Memastikan bahwa kerja sama perdagangan yang dibangun oleh Qatar dengan Iran mematuhi sanksi-sanksi yang telah dibuat oleh Amerika Serikat dan tidak mengganggu keamanan negara-negara Teluk.

Menanggapi 13 tuntutan tersebut, Menteri Luar Negeri Qatar, Syeikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani menyatakan bahwa 13 ultimatum Arab Saudi kepada negaranya tidak dapat diterima, terlebih lagi terdapat poin yang menyatakan bahwa Qatar harus mengakhiri hubungannya dengan kelompok

teroris, ia menyatakan bahwa permintaan tersebut adalah tuntutan yang tidak berdasarkan pada bukti, dan tidak bisa diterima (Dharma, 2017). Upaya lainnya juga datang dari salah satu negara di Timur Tengah Sendiri, negara itu adalah Kuwait yang mencoba untuk menjadi penengah bagi Arab Saudi dan Qatar, Kuwait bekerja sama dengan negara-negara anggota GCC dalam merumuskan perdamaian antara kedua belah pihak,

namun sayang hal tersebut dinilai telah gagal, karena hingga saat ini belum ada langkah-langkah menuju resolusi signifikan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Belum lagi, Amerika Serikat mendorong Kuwait untuk melakukan eskalasi perlawanan terhadap Iran. Hal ini jelas menimbulkan ketidaknyamanan tersendiri bagi Kuwait, mengingat sebelumnya, negara itu berupaya untuk netral dari permasalahan yang saat ini terjadi di Timur Tengah (Diwan, 2018). Respon yang sama juga datang dari Oman, dimana negara itu sama sekali tidak ingin terlibat dalam pembelaan terhadap kedua belah pihak. Kenetralan Oman dalam krisis diplomatik yang melibatkan Qatar dan Arab Saudi serta beberapa negara Teluk lainnya bukanlah sebuah niscaya, melainkan sebuah misi untuk menjalankan prinsip kebijakan luar negerinya yang telah tercatat dalam buku kebijakan luar negeri Oman. Kesultanan Oman memang sudah lama menerapkan prinsip kebijakan luar negeri yang independen, serta menjauhi blok-blok politik yang ada di kawasan, hal tersebut dilakukan kesultanan Oman guna menjaga stabilitas hubungan antara Oman dengan negara-negara tetangganya, dan menerapkan prinsip non-intervensi terhadap permasalahan domestik yang ada di negara-negara tetangganya, serta bentuk penghormatan terhadap hukum internasional, konvensi-konvensi, dan aturan-aturan lainnya. Meskipun begitu, Oman tetap menjalin hubungan dengan Qatar dengan baik tanpa terlibat dalam dukungan

terhadap pihak manapun dalam krisis diplomatik yang saat ini terjadi. Doha awalnya memang telah mencari rekan-rekan di Muscat untuk menengahi pertikaian yang saat ini sedang terjadi antara Qatar dan Arab Saudi serta beberapa negara anggota GCC lainnya, saat itu, Oman telah disepakati untuk menjadi negara yang menengahi krisis diplomatik tersebut, namun menimbang banyaknya sensitivitas yang ada dalam permasalahan itu, Oman menolak untuk menjadi mediator bagi krisis diplomatik tersebut. Kendati begitu, Oman tetap mendukung adanya mediasi yang saat ini dilakukan oleh Kuwait dan Amerika Serikat dalam rangka untuk menyelesaikan krisis diplomatik Qatar tersebut (Babood, 2017). Apa yang dilakukan oleh kedua negara tersebut sebenarnya tidak memberikan efek apapun bagi kebijakan blokade yang diterapkan Arab Saudi terhadap Qatar, Belum lagi dengan adanya ungkapan pesimis yang dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Yousof bin Alawi, yang mengatakan bahwa: *The Standoff pitting Bahrain, Saudi Arabia, The Uni Arab Emirates and Egypt against Qatar is not “eligible for solution”*, ia menyampaikan hal tersebut saat memberikan kuliah umum terkait kebijakan luar negeri Oman di Muscat (Toumi, 2019).

## **2.3 Dampak-Dampak Kebijakan Blokade Arab Saudi Terhadap Qatar**

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan blokade yang diterapkan Arab Saudi terhadap Qatar telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan bagi negara tersebut, baik dampak tersebut bersifat negatif ataupun positif. Dampak-dampak dari blokade itu terbagi ke dalam beberapa sektor yang antara lain adalah; dampak di bidang politik, dampak di bidang ekonomi, dampak di bidang transportasi dan akomodasi, serta dampak di bidang kemanusiaan.

### **2.3.1 Dampak Di Bidang Politik**

Adapun dampak dari kebijakan blokade yang diterapkan Arab Saudi terhadap Qatar dalam bidang politik dapat dilihat dari beberapa negara lainnya yang sebelumnya menjalin hubungan diplomatik dan kerja sama dengan Qatar secara tiba-tiba memutuskan untuk mengikuti jejak Arab Saudi dalam pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar. Negara-negara tersebut antara lain adalah Uni Emirat Arab dan Bahrain dan Mesir (Dennis, 2018). Tidak hanya itu, dua negara Arab lainnya yaitu Yaman dan Libya juga sepakat untuk memutus hubungan diplomatik dengan Qatar, selain itu terdapat satu negara diluar negara Arab yang juga mengambil keputusan untuk memutus hubungan diplomatik dengan Qatar, negara tersebut adalah Maladewa (Wadrianto, 2017). Dampak

politik lainnya yang menimpa Qatar adalah dalam bentuk klaim, dimana negara-negara yang melakukan blokade terhadap Qatar mendasarkan tindakan mereka pada ulah Qatar sendiri yang cenderung berpihak pada *Ikhwanul Muslimin* dimana Arab Saudi dan kawan-kawannya menganggap bahwa *Ikhwanul Muslimin* adalah organisasi teroris (Knell, 2018), hal tersebut secara tidak langsung menimbulkan *stereotype* dalam dunia internasional bahwa Qatar adalah negara yang mendukung organisasi teroris.

### 2.3.2 Dampak Di Bidang Ekonomi

Berbicara mengenai dampak dari kebijakan blokade Arab Saudi terhadap Qatar dalam bidang ekonomi sebenarnya tidak seburuk seperti yang dibayangkan. Kendati di awal-awal penerapan blokade tersebut, Qatar mengalami indeks penurunan saham hingga pada titik merah. Pada 4 Juni 2017, indeks saham Qatar yang diukur melalui QE (*Quantitative Easing*) ditutup dengan angka 9.923,6. Sedangkan hari berikutnya tepat dimana Arab Saudi dan beberapa negara Teluk lainnya melakukan blokade terhadap Qatar, angka tersebut anjlok ke angka 9.151. Tidak hanya itu, saham yang ada di semua sektor ketika itu anjlok seketika, namun yang paling parah adalah saham *real estate* dengan penurunan nilai yang mencapai 9,9 persen pada pukul 16.52

WIB. Selain itu tidak ada sektor yang penurunannya lebih rendah dari 5 persen (Zuhra, 2017). Seiring berjalannya waktu, ekonomi Qatar akhirnya kembali membaik, hal tersebut sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Ayham Kamel, ketua *Middle East News Agency* bahwa Qatar tidak benar-benar sedang terisolasi dalam dunia internasional saat ini, itulah pentingnya cadangan gas dan juga ekspor gas yang dilakukan oleh Qatar sebagai lumbung uang baginya. Melalui kekayaan serta dana yang dimiliki negara, Qatar hingga saat ini dalam perekonomian yang sehat (Al-Jazeera, 2018). Hal itu dapat dilihat dari persiapan Qatar dalam rangka menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2022, dimana mereka dengan cepat mengimpor bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan dari China dan Malaysia setelah pemberlakuan blokade terhadap dirinya oleh Arab Saudi yang bermula sejak 5 Juni 2017 silam (FT, 2018). Namun jika berbicara dari segi efektifitas kerja sama ekonomi yang dibangun oleh Qatar dilihat dari sebelum krisis diplomatik terjadi, tentunya terdapat perbedaan yang cukup signifikan, mengingat, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab merupakan tetangga terdekat Qatar yang selalu mengirimkan pasokan makanan ke Qatar karena faktor kedekatan geografis. Lebih dari itu, kerja sama antara Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain juga memiliki persentase tertinggi, yaitu sebesar 86 persen dari

total kerja sama dagang dengan negara-negara Arab (Muliana, 2017).

### **2.3.3 Dampak Di Bidang Akomodasi Dan Transportasi**

Adapun dampak dari kebijakan blokade Arab Saudi terhadap Qatar di bidang akomodasi dan transportasi dapat dilihat dari penutupan akses untuk menuju Arab Saudi dan ketiga negara Teluk lainnya melalui jalur tanah, udara dan juga laut (عربي, 2019). Kebijakan ini jelas sangat merugikan masyarakat Qatar yang ingin melakukan perjalanan keluar negeri, terutama bagi masyarakat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji, mereka harus terhalangi dengan adanya pembatasan terhadap jalur-jalur transportasi tersebut.

### **2.3.4 Dampak Di Bidang Kemanusiaan**

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan blokade yang diterapkan Arab Saudi dan ketiga negara Teluk lainnya terhadap Qatar telah mencederai HAM di kawasan Timur Tengah. Sejak kebijakan blokade tersebut diterapkan, setiap warga Qatar yang tinggal di negara Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir harus meninggalkan negara tersebut dalam jangka waktu 14 hari, sedangkan mereka yang tinggal di negara-negara tersebut telah banyak yang menikah dengan

orang Arab Saudi dan ketiga negara lainnya dan telah memiliki anak, namun mereka tetap dipaksa untuk meninggalkan negara-negara tersebut dan berpisah dengan keluarganya, hal serupa juga berlaku bagi warga negara Arab Saudi dan warga ketiga negara tersebut yang tinggal di Qatar, mereka diminta untuk kembali ke negara mereka dalam jangka waktu 14 hari, dan hasilnya perceraian antara warga Arab Saudi yang menikah dengan warga Qatar pun semakin banyak (حسن نبي, 2017). Sebagai contoh adalah Fathimah, dia merupakan warga Saudi asli yang menikah dengan warga Qatar dan telah memiliki 4 orang anak, ia mengatakan bahwa situasi ini semakin memperkeruh suasana, dan mempersulitnya untuk menjalin hubungan kerabat-kerabatnya di Qatar, karena blokade telah memaksanya untuk menarik diri dari media sosial (الاجه نبي, 2018). Selain itu, penerapan blokade terhadap wilayah perairan, darat dan udara yang menghubungkan antara Qatar dan Arab Saudi juga sangat mengganggu rutinitas masyarakat Qatar, terutama bagi masyarakat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji ke Mekkah, hal itu menjadi sangat sulit untuk dilakukan lantaran adanya hambatan dari jalur udara oleh pemerintah Arab Saudi terhadap Qatar, selain itu, satu-satunya jalur masuk melalui pos perbatasan yang menghubungkan Qatar dan Arab Saudi melalui jalur darat

juga telah ditutup selama dua tahun (Perdana, 2019). Pembatasan tersebut kemudian menuai kecaman dari berbagai pihak, salah satunya adalah dari *Al-Quds Al-Arabi*, komite menuding Arab Saudi telah melanggar rambu-rambu syari'ah serta hukum internasional, komite menjelaskan bahwa pelarangan dan pembatasan tersebut bertentangan dengan rukun Islam yang kelima, yang isinya adalah mewajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk melakukan ibadah haji sekali seumur hidup (Aminuddin, 2018). Tuduhan terkait larangan bagi warga Qatar untuk menunaikan ibadah haji ke Mekkah tidak hanya tertuju pada Arab Saudi, tuduhan serupa juga tertuju pada negara Qatar itu sendiri, yang diduga kuat disebabkan oleh krisis diplomatik yang terjadi di Qatar saat ini, namun pemerintah Qatar sendiri telah membantah tuduhan tersebut melalui QNA (*Qatar News Agency*), otoritas Qatar di kementerian Urusan agama juga menafikkan tuduhan tersebut pada 1 Agustus 2018, ia mengatakan bahwa pemerintah Qatar sama sekali tidak melarang warganya untuk menunaikan ibadah haji, hanya saja mereka hanya menyesalkan oknum-oknum yang menjadikan momen haji sebagai tujuan politik semata (Augesti, 2018).

**BAB III:**  
**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB**  
**DITERAPKANNYA KEBIJAKAN BLOKADE QATAR**  
**OLEH ARAB SAUDI MELALUI PERSPEKTIF *DECISION***  
***MAKING***

Setelah membahas tentang kebijakan blokade yang diterapkan Arab Saudi terhadap Qatar pada bab sebelumnya, pada bab ini, penulis akan mencoba untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan blokade terhadap Qatar dengan menggunakan lensa teoritis yang bernama *Decision Making*. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab I tepatnya pada bagian kerangka konseptual, bahwa teori ini berfungsi untuk menganalisis proses pembuatan kebijakan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan tersebut. Coplin mendefinisikan teori ini sebagai cara untuk mengetahui perilaku negara dalam hubungan internasional. ia juga menambahkan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi seorang pembuat kebijakan dalam menentukan sebuah kebijakan luar negeri, faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal, kelompok domestik akan menekan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan mereka, lalu politisi akan melihat hal ini sebagai peluang untuk mencari kekuatan dengan membangun koalisi bersama kelompok-kelompok tersebut. Sedangkan pada faktor eksternal, pemerintah akan berupaya untuk memaksimalkan kemampuan mereka dalam rangka untuk memenuhi

kepentingan domestik, sambil meminimalisir konsekuensi yang merugikan pihak asing (Coplin, 2003). Secara fungsi, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi seorang aktor hubungan internasional dalam menentukan arah kebijakan luar negeri yang akan dibuatnya. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan yang ada di negaranya. Hal itu dilakukan dengan cara melihat pada keadaan domestik dan keadaan internasionalnya.

Dalam konteks ini, penulis akan mencoba untuk menganalisis secara khusus terkait faktor-faktor yang membuat Arab Saudi harus mengeluarkan kebijakan untuk blokade terhadap Qatar, dengan memperhatikan keadaan pada faktor internal atau domestik Arab Saudi itu sendiri dan juga faktor eksternalnya, yang dalam hal ini adalah keadaan di kawasan Timur Tengah secara umum.

### **3.1 Faktor Internal**

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa pada faktor internal dalam teori *Decision Making*, menerangkan bahwa kelompok-kelompok domestik memiliki peranan penting dalam mendorong aktor pemangku kebijakan yang dalam hal ini adalah pemerintah untuk mengeluarkan atau membuat kebijakan yang sesuai dengan kepentingan kelompok-kelompok tersebut, politisi yang menyaksikan hal ini tentu menganggapnya sebagai peluang bagi mereka untuk menambah kekuatan dengan cara menjalin koalisi

bersama kelompok-kelompok tersebut. Berbicara mengenai faktor di faktor internal atau lebih tepatnya faktor domestik yang menyebabkan Arab Saudi memberlakukan kebijakan blokade terhadap Qatar sebenarnya menjadi sebuah bahasan yang cukup rumit, hal ini tidak lain disebabkan oleh sistem pemerintahan Arab Saudi itu sendiri yang hingga saat ini masih bertahan dengan monarki absolutnya. Secara tidak langsung penulis ingin mengatakan bahwa faktor domestik yang menyebabkan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan tersebut kemungkinan besar akan banyak tertuju pada keadaan dalam lingkup Kerajaan Arab Saudi semata, dan akan sangat sulit untuk melihat adanya dorongan dari kalangan masyarakat bawah, karena hal tersebut hampir mustahil terjadi di negara yang menganut sistem monarki absolut seperti Arab Saudi.

### **3.1.1 Faktor Internal Kerajaan Arab Saudi**

Jika ditinjau dari keadaan internal domestiknya yang dalam hal ini adalah kerajaan Arab Saudi itu sendiri mungkin sangat jarang diketahui bahwa salah satu faktor penyebab Arab Saudi menerapkan blokade terhadap Qatar tersebut adalah karena faktor dendam sejarah pada tahun 1995 yang telah lama dipendam oleh Kerajaan Arab Saudi, ditambah lagi dengan ambisi dari putra mahkota, pangeran Muhammad bin Salman yang saat ini menjalankan urusan

Kerajaan dan berniat untuk mengendalikannya di seluruh wilayah juga memiliki pandangan yang suram terhadap Qatar (بدر كحلان, 2017). Sebagaimana diketahui bahwa hubungan antara Arab Saudi dan Qatar sudah mulai merenggang semenjak tahun 1995, tepatnya ketika pangeran Hamad bin Khalifa Al Thani menggulingkan kekuasaan ayahnya sendiri, Khalifa bin Hamad Al Thani yang saat itu tengah berlibur ke Jenewa, kudeta tersebut ditentang keras oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, pasalnya pangeran Hamad bin Khalifa Al Thani muncul dengan konsep kepemimpinan baru yang cenderung bertentangan dengan arah perpolitikan Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya, berbeda dengan ayahnya, Khalifa bin Hamad Al Thani yang pro terhadap Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya di Timur Tengah (Kristanti, 2017).

Sekalipun sulit untuk membayangkan bahwa masyarakat akan berani untuk menyuarakan pendapat mereka terkait blokade yang dilakukan Arab Saudi terhadap Qatar, namun ternyata hal tersebut memang benar terjadi, dimana beberapa masyarakat Arab Saudi yang juga telah menikah dengan warga Qatar menyampaikan kekesalannya terkait imbas dari blokade yang dibuat oleh Arab Saudi tersebut. Sebagaimana telah dicontohkan pada bab II, tepatnya pada bagian D terkait dampak blokade Arab Saudi terhadap Qatar

bagi kemanusiaan, dimana seorang perempuan bernama Fatimah, seorang warga Arab Saudi yang menikah dengan warga Qatar dan telah memiliki empat orang anak menceritakan kekesalannya terkait imbas dari kebijakan blokade yang diterapkan oleh Arab Saudi terhadap Qatar, dalam wawancara yang dilakukan oleh DIFI (*Doha International Family Insitute*), ia mengatakan bahwa situasi ini semakin memperkeruh suasana, dan mempersulitnya untuk menjalin hubungan kerabat-kerabatnya di Qatar, hal tersebut disebabkan oleh blokade yang telah memaksanya untuk menarik diri dari media sosial (الجهني, 2018). Namun tentunya hal tersebut bukanlah menjadi suatu yang berarti bagi Arab Saudi untuk tidak meneruskan kebijakan blokade mereka terhadap Qatar, karena sebenarnya faktor yang paling berpengaruh dalam penerapan kebijakan blokade tersebut adalah internal Kerajaan Arab Saudi itu sendiri.

### **3.2 Faktor Eksternal**

Selain faktor internal domestik Arab Saudi juga didorong oleh faktor eksternal . Terkait dengan faktor-faktor eksternal, dengan kata lain adalah faktor-faktor yang berasal dari lingkup internasional tentang pengaruhnya dalam pembuatan kebijakan blokade Arab Saudi, penulis bermaksud untuk membagi faktor-faktor yang ada pada faktor eksternal tersebut ke dalam beberapa bagian. Bagian pertama adalah faktor

kedekatan antara Qatar dan Iran, dimana akan menjabarkan bagaimana hubungan antara Qatar dan Iran ini berpengaruh pada kebijakan blokade yang diterapkan oleh Arab Saudi terhadap Qatar. Bagian kedua akan membahas mengenai faktor kedekatan Qatar dengan organisasi *Ikhwanul Muslimin*, dimana hal ini juga merupakan salah satu alasan mengapa Arab Saudi menerapkan kebijakan blokade terhadap Qatar. Sedangkan pada bagian ketiga, penulis akan lebih banyak menyoroti terkait bagaimana Arab Saudi menganggapi negara Timur Tengah yang mencoba untuk bersikap netral, dalam artian tidak berada di pihak manapun, baik Arab Saudi maupun Qatar. Negara tersebut adalah Kuwait yang mencoba untuk menjadi penengah atas bagi negara-negara yang terlibat dalam sengketa krisis Teluk, termasuk Arab Saudi dan Qatar.

### **3.2.1 Faktor Hubungan Qatar Dengan Iran**

Qatar dan Iran merupakan kedua negara Timur Tengah yang saling bertetangga antara satu dengan yang lainnya, keduanya memiliki sedikit kesamaan dalam hal geografi, jumlah populasi penduduk, struktur demografi, sejarah, politik dan juga ideologi. Dengan sekian banyak persamaan tersebut, keduanya digambarkan sebagai negara yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama mereka, dengan memaksakan keadaan pada satu sisi serta strategi dan pilihan kebijakan yang ditentukan oleh pemimpin mereka

untuk negara-negara lainnya (Kamrava, 2017). Hubungan antara kedua negara telah terjalin secara baik pada tahun 1995, pada masa itu, Qatar dipimpin oleh pangeran Hamad bin Khalifa Al Thani, yang banyak mengubah pola perpolitikan Qatar pada masa itu. Qatar yang sebelumnya berhubungan baik dengan Arab Saudi ketika masiih dipimpin oleh Khalifa bin Hamad Al Thani, saat itu berubah seketika, pada masa pemerintahan pangeran Hamad bin Khalifa Al Thani. Pada tahun itu, Qatar mulai menjalin hubungan baik dengan Iran melalui kerja sama dalam pengelolaan gas alam cair dari *Reservoir* yang terletak di lepas pantai North Field, yang luasnya setara dengan Qatar (Prastiwi, 2017). Kendati begitu hubungan antara keduanya tidak selalu baik, pada tahun 2010 hingga tahun 2016, Qatar sempat memberlakukan sanksi internasional terhadap Iran, diwaktu yang bersamaan, Qatar bahkan sempat menarik duta besarnya dari Iran pada februari 2016 (Katzman, 2019).

Namun saat ini, hubungan antara kedua negara sudah kembali normal, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Hassan Rouhani, Presiden Iran bahwa ia bersedia untuk meningkatkan hubungan baik antara Iran dan Qatar, dan pada 5 juni 2019 lalu emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani didapati sedang bertukar salam Idul Fitri bersama presiden Iran tersebut (Utomo, 2019). Kabar ini

tentunya merupakan kabar baik bagi Qatar, namun tidak bagi Arab Saudi, karena salah satu yang menyebabkan putusnya hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Qatar adalah karena kedekatan Qatar dengan Iran, negara yang sangat dimusuhi oleh Arab Saudi. Kedekatan tersebut pulalah yang kemudian memicu Arab Saudi untuk melakukan blokade terhadap Qatar, karena Arab Saudi menilai bahwa Iran adalah ancaman bagi kawasan, dan jika Qatar ingin krisis diplomatik ini segera diselesaikan salah satu tuntutan Arab Saudi adalah menutup misi diplomatik di Taheran dan mengurangi intensitas kedekatan Qatar dengan Iran (Unit, 2017).

Adapun faktor lain yang mungkin bisa jadi pemicu retaknya hubungan antara Arab Saudi dengan Qatar mungkin disebabkan oleh keberpihakan Qatar pada Iran dilihat dari bagaimana Qatar memilih Iran sebagai partnernya dalam kerja sama ekonomi dibanding Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya sebagaimana telah tertera diatas, hal ini tentunya menimbulkan kecemburuan bagi Arab Saudi, dan secara tidak langsung memancing negara tersebut untuk berupaya membuktikan eksistensinya di Timur Tengah bahwa Arab Saudi masih sangat bisa untuk membangkitkan perekonomiannya bersama negara-negara Teluk tanpa bantuan Qatar.

### 3.2.2 Faktor Kedekatan Qatar Dengan *Ikhwanul Muslimin*

Kedekatan antara Qatar dan organisasi *Ikhwanul Muslimin* memang sudah tidak diragukan lagi, dari sekian banyak negara di Timur Tengah, hanya Qatar yang terlihat paling membuka diri terhadap organisasi ini, hal itu dibuktikan dengan banyaknya tokoh-tokoh ternama dari organisasi tersebut yang kemudian diberi suaka politik oleh Qatar dan memperoleh kewarganegaraan dari negara tersebut. Sebut saja, Yusuf Qardhowi; salah satu tokoh *Ikhwanul Muslimin* yang cukup terkemuka di kalangan dunia Islam maupun umum, beliau sangat terkenal dengan pemikirannya yang moderat “*middle path*” atau menggunakan jalan tengah, yaitu pemikiran Islam yang tidak terlalu konservatif (*salafi*), namun tidak juga terlalu bebas, atau menerima sepenuhnya pemikiran Barat yang liberal (Jonston, 2014). Sekalipun Qardhowi adalah orang yang namanya cukup terkemuka di Qatar, disebabkan oleh kecerdasannya dalam bidang ilmu Fiqh, dimana beliau juga merupakan seorang pendiri *Faculty Of Shari'a* di Qatar *University* pada tahun 1961, namun beliau bukanlah satu-satunya tokoh *Ikhwanul Muslimin* yang terkenal di Qatar, terdapat beberapa tokoh *Ikhwanul Muslimin* lainnya yang juga menduduki posisi-posisi strategis di Qatar, yang mayoritasnya terpusat pada sektor pendidikan. Adapun

tokoh-tokoh tersebut antara lain adalah Abdul Badi Saqr yang juga berasal dari Mesir dan pindah ke Qatar pada tahun 1954, beliau pernah menjabat sebagai direktur bidang pendidikan di Qatar dan juga pernah menjadi kepala perpustakaan nasional Qatar, selain itu terdapat juga tokoh

*Ikhwanul Muslimin* yang merupakan utusan langsung dari Hassan Al-Banna untuk pergi ke Palestina pada tahun 1946, beliau bernama Abdel Muaz Al Sattar. Beliau pernah menjabat sebagai inspektur sekolah di Qatar, kemudian pernah menjabat sebagai kepala sekolah dalam ilmu Islam dibawah kementerian pendidikan Qatar (Roberts, 2014).

*Ikhwanul Muslimin* merupakan sebuah organisasi yang dilabeli teroris oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Mesir, hal ini salah satunya disebabkan oleh sejarah dari *Ikhwanul Muslimin* yang dikecam oleh Arab Saudi, dimana mereka pernah melakukan pembunuhan terhadap perdana menteri Mesir dan wakilnya, Maher Pasha dan Mahmud fahmi An-naqrasny sebelum aksi demo yang terjadi pada tahun 1954

(اسامة, 2010).

Dengan adanya sejarah tersebut, rasanya sangat wajar jika Arab Saudi dan Mesir sangat membenci *Ikhwanul Muslimin*, karena Arab Saudi menganggap bahwa organisasi tersebut bisa menjadi ancaman serius bagi kawasan, persepsi tersebut kemudian diimplementasikan dengan melakukan

blokade terhadap Qatar, karena kedekatannya dengan *Ikhwanul Muslimin*. Secara tidak langsung kedekatan antara Qatar dan *Ikhwanul Muslimin* telah memancing Arab Saudi untuk melakukan blokade terhadap Qatar. adapun hal lainnya yang membuat kemarahan Arab Saudi kepada Qatar semakin memuncak adalah keterlibatan Qatar dalam melakukan pendanaan terhadap *Ikhwanul Muslimin*, hal tersebut dibuktikan dalam sebuah buku yang ditulis oleh dua jurnalis Perancis yang bernama Georges Malbrunot dan Christian Chesnot menggambarkan bahwa Qatar telah menggelontorkan dana yang besar untuk proyek *Ikhwanul Muslimin* di seluruh Eropa, pada halaman pengantar buku tersebut, terdapat dokumen-dokumen rincian pendanaan dari puluhan masjid dan masyarakat Islam untuk mempromosikan *Ikhwanul Muslimin* di Perancis dan Swiss (Fadhilah, 2019). Relevansinya dengan teori *Two Unsur Game* adalah, bahwa Arab Saudi melihat adanya gejolak atau tekanan yang ditimbulkan oleh organisasi *Ikhwanul Muslimin* di Timur Tengah, dan Qatar telah terpengaruh akan hal tersebut, khawatir akan kemungkinan bertambahnya negara yang menerima organisasi tersebut, akhirnya Arab Saudi harus menentukan sikap dengan melakukan blokade terhadap Qatar atas keberpihakannya terhadap organisasi tersebut.

### 3.2.3 Faktor Dukungan dari Kawasan

Selain mempertimbangkan keadaan yang berlaku di internal domestik atau nasionalnya, Arab Saudi juga melihat peluang yang berlaku di internal kawasan Timur Tengah itu sendiri, dimana Arab Saudi melihat bahwa kebijakan blokade yang dibuat olehnya didukung oleh beberapa negara Arab lainnya, dukungan tersebut dapat dilihat melalui keikutsertaan beberapa negara Arab lainnya dalam penerapan kebijakan blokade terhadap Qatar, adapun negara-negara tersebut antara lain adalah Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir (Kucukasci, 2019). Jika disesuaikan dengan teori *Decision Making*, penulis melihat bahwa Arab Saudi merupakan aktor politis yang berupaya untuk membangun kekuatannya dengan menjalin koalisi bersama negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama dengannya dalam rangka untuk mencapai keuntungan politik di kawasan Timur Tengah. Keuntungan politik yang mungkin akan diterima Arab Saudi dapat berupa klaim bahwa Arab Saudi adalah negara yang paling hegemon di Dewan Kerja Sama Negara-negara Teluk dan di kawasan Timur Tengah.

**Tabel Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Arab Saudi  
Dalam Melakukan Blokade Terhadap Qatar Ditinjau  
Dari Perspektif *Decision Making***

**Tabel II**

No	Faktor internal (Negara)	Faktor eksternal
1.	Internal Kerajaan Arab Saudi (dendam lama terhadap Qatar sejak tahun 1995)	Hubungan Qatar dengan Iran
2.		Hubungan Qatar dengan <i>Ikhwanul Muslimin</i>
3.		Faktor Dukungan dari Kawasan, yaitu UEA, Bahrain dan Mesir yang mendukung Arab Saudi dalam melakukan blokade terhadap Qatar, dilihat dari keikutsertaan ketiga negara tersebut dalam menerapkan blokade terhadap Qatar.

## **BAB IV: PENUTUP DAN KESIMPULAN**

### **4.1. Rangkuman**

Krisis diplomatik Qatar yang terjadi sejak tahun 2017 silam merupakan sebuah fenomena politik yang banyak disorot oleh dunia internasional. Krisis tersebut berawal sejak Arab Saudi memutuskan untuk menghentikan hubungan diplomatiknya dengan Qatar pada 5 Juni 2017. Keputusan Arab Saudi tersebut kemudian diikuti oleh beberapa negara Arab lainnya yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir. Selain memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, Arab Saudi juga memberlakukan kebijakan blokade terhadap Qatar dari segala sektor yang menghubungkan Arab Saudi dengan Qatar, baik sektor darat, laut maupun udara. Seperti halnya pemutusan hubungan diplomatik, kebijakan blokade Arab Saudi terhadap Qatar tersebut juga diikuti oleh ketiga negara Arab diatas, dimana mereka juga menerapkan hal yang sama terhadap Qatar persis seperti apa yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadapnya. Sebenarnya keempat negara tersebut telah bersedia untuk mengakhiri krisis diplomatik yang terjadi, hanya saja hal itu bisa dilakukan jika Qatar sanggup memenuhi 13 tuntutan yang mereka ajukan kepadanya, yang beberapa diantaranya adalah menghentikan aliran dana terhadap organisasi teroris, mengakhiri hubungan dengan *Ikhwanul Muslimin* dan meminimalisir hubungan diplomatik dengan Iran. Qatar lantas menolak secara keras tuntutan tersebut, terutama tuntutan yang

berisikan tentang menghentikan aliran dana kepada organisasi terorisme, pemerintah Qatar menganggap tuntutan tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan tidak bisa diterima. Menanggapi penekanan yang datang terhadap dirinya dari beberapa negara Teluk tersebut, Qatar tentunya tidak tinggal diam, sebagaimana telah dijelaskan pada bab 1, bahwa pada awal-awal diterapkannya kebijakan tersebut, Qatar mengalami tingkat kerugian yang signifikan dari segi finansial, dimana jumlahnya mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Berdasarkan hal itu, Qatar kemudian mengupayakan agar Arab Saudi dan teman-temannya bersedia untuk membayar kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat kebijakan blokade yang mereka terapkan terhadap negara tersebut. Namun hal itu tidak pernah digubris oleh Arab Saudi dan teman-temannya. Satu-satunya cara bagi Qatar untuk menaikkan kembali taraf perekonomiannya adalah dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimilikinya yaitu, LNG, minyak bumi dan gas alam serta memasifkan kerja sama dengan negara-negara yang masih menjalin hubungan diplomatik dengannya, seperti Iran, Turki, Oman dan beberapa negara Eropa untuk menopang kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat Qatar. Namun tentu saja, jika ditinjau dari segi efektifitas, hubungan kerja sama antara Qatar dengan Arab Saudi dan beberapa negara lain yang melakukan blokade terhadapnya saat ini, jauh lebih efektif dibandingkan dengan apa yang Qatar lakukan bersama negara-negara yang saat ini membantunya karena dilanda blokade tersebut. Hal itu

sebagaimana dijelaskan di bab 2, bahwa kerja sama antara Qatar dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dalam bidang ekonomi menghasilkan 86 persen keuntungan dari total seluruh kerja sama ekonomi yang dilakukan Qatar dengan dengan negara-negara Arab lainnya di Timur Tengah. Selain berdampak pada sektor ekonomi, pada bab 2 juga telah dijelaskan secara komprehensif terkait dampak dari kebijakan blokade Qatar tersebut terhadap beberapa sektor lainnya, yang diantaranya adalah politik, akomodasi dan transportasi serta kemanusiaan.

Dampak pada sektor politik dapat dilihat dari keikutsertaan beberapa negara-negara Teluk dan Arab terhadap Arab Saudi dalam memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar, sebagaimana telah dijelaskan bahwa terdapat 5 negara Arab yang mengikuti Arab Saudi untuk memutuskan hubungan diplomatik mereka dengan Qatar, dua diantaranya adalah negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk atau GCC, yaitu Uni Emirat Arab dan Bahrain, sedangkan tiga lainnya adalah Yaman, Libya dan Mesir. Selain itu, klaim negara tersebut terhadap Qatar sebagai negara yang mendanai organisasi teroris juga menimbulkan *stereotype* yang buruk bagi Qatar dalam dunia internasional. Dampak yang selanjutnya adalah pada bidang transportasi dan akomodasi, dimana pada bidang ini, masyarakat Qatar dibatasi mobilitasnya untuk melakukan perjalanan ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain melalui sektor darat, laut dan udara, hal ini jelas sangat merugikan masyarakat Qatar, mengingat

sebagian besar masyarakat Qatar adalah muslim, dan secara otomatis akan sangat sulit bagi mereka untuk menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji disebabkan oleh adanya blokade tersebut. Dampak yang terakhir dapat dilihat pada sektor kemanusiaan, sebagaimana telah dijelaskan pada bab 2 bahwa OHCHR sendiri telah mengindikasikan adanya pelanggaran HAM yang terjadi terhadap warga Qatar akibat adanya kebijakan blokade tersebut, diantaranya adalah pembatasan terhadap kebebasan, dimana warga Qatar dilarang untuk melakukan perjalanan ke Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab, lalu pemisahan antara sanak keluarga dan kerabat, dimana setelah diberlakukannya kebijakan blokade tersebut, Arab Saudi dan kedua negara Teluk di atas mengharuskan bagi warga Qatar yang tinggal di negara mereka agar meninggalkan negara-negara tersebut dalam jangka waktu 14 hari, hal itu jelas merugikan warga Qatar, terlebih bagi mereka yang telah melakukan pernikahan campuran. Dampak kemanusiaan ini tidak hanya berlaku bagi warga Qatar saja, beberapa warga Saudi juga terkena imbas dari kebijakan blokade yang diterapkan oleh negaranya tersebut. Sebagaimana contoh yang telah ada pada bab 2 dimana terdapat seorang wanita Saudi bernama Fatimah yang menikah dengan laki-laki Qatar dan telah memiliki 4 orang anak dengan terpaksa harus berpisah dengan suaminya disebabkan oleh kebijakan blokade tersebut. Seiring berjalannya waktu, kebijakan blokade Arab Saudi terhadap Qatar tersebut akhirnya menuai respon dari berbagai pihak, diantaranya adalah PBB

yang diwakili oleh ODHCR yang mengecam keras kebijakan blokade Qatar yang diterapkan oleh Arab Saudi, karena telah melanggar nilai-nilai HAM yang dibawa oleh PBB. Selanjutnya terdapat pula dua negara di Timur Tengah yang berupaya untuk netral dan menjadi penengah bagi keduanya, adalah Kuwait dan Oman yang hingga saat ini menyatakan sikap netral mereka terkait konflik yang terjadi antara Arab Saudi dan Qatar. Namun keduanya berbeda dalam mengimplementasikan kenetralannya terhadap kedua belah pihak, disatu sisi, Kuwait merupakan negara yang berambisi kuat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara kedua negara melalui jalur mediasi yang disediakannya bersama dengan Amerika Serikat. Disisi lain, Oman lebih terlihat tidak mau ikut campur dalam permasalahan tersebut, negara itu hanya berupaya untuk menjalin hubungan baik dengan keduanya, hal ini sebagaimana komitmen dalam politik luar negeri Oman itu sendiri yang melarang adanya intervensi bagi permasalahan di negara lain.

Seperti halnya dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara secara umum, kebijakan blokade Arab Saudi terhadap Qatar ini tentunya memiliki beberapa faktor. Jika ditinjau dari perspektif *Decision Making* sebagaimana telah dijelaskan pada bab 3, faktor-faktor yang mempengaruhi Arab Saudi dalam membuat kebijakan blokade tersebut terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mempertimbangkan bagaimana keadaan domestik suatu negara mendorong negara tersebut untuk

mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan internal negara tersebut. Seperti halnya Arab Saudi, dimana internal Kerajaan Saudi telah mendorong negara itu untuk mengeluarkan kebijakan blokade tersebut, dimana mereka memiliki dendam lama terhadap Qatar yang sudah dipendam sejak tahun 1995. Sedangkan pada faktor eksternal, adalah faktor-faktor yang mempengaruhi Arab Saudi dalam memberlakukan kebijakan blokade tersebut dapat dilihat dari keadaan internasionalnya, dalam hal ini adalah kawasan Timur Tengah itu sendiri. Jika ditinjau dari faktor eksternal terdapat tiga faktor utama yang membuat Arab Saudi memberlakukan kebijakan blokade terhadap Qatar. Pertama adalah hubungan antara Arab Saudi dengan Iran, dimana keduanya sudah memiliki hubungan sejak lama, terhitung saat pangeran Hamad bin Khalifa Al Thani menggantikan posisi ayahnya sebagai emir Qatar pada tahun 1995, dimana pada masa itu keduanya sepakat untuk menjalin kerja sama dalam pengelolaan gas alam cair dari *Reservoir* yang terletak di lepas pantai North Field. Semenjak saat itu, hubungan antara Qatar dan Arab Saudi sudah mulai renggang, karena Qatar telah melakukan kerja sama dengan negara yang dianggap oleh Arab Saudi sebagai musuh besar. Oleh karena itu, penulis menganggap bahwa kedekatan antara Qatar dan Iran saat ini menjadi salah satu faktor pemicu utama bagi Arab Saudi untuk melakukan blokade terhadap Qatar. Kedua adalah, hubungan antara Qatar dengan organisasi *Ikhwanul Muslimin*. Sudah menjadi rahasia umum jika kedekatan Qatar dan *Ikhwanul Muslimin*

tidak dapat ditutup-tutupi lagi, banyaknya tokoh *Ikhwanul Muslimin* yang berhijrah ke Qatar menjadi salah satu bukti kongkrit akan kedekatannya dengan organisasi tersebut. Sebut saja Yusuf Qordhowi, seorang tokoh *Ikhwanul Muslimin* dari Mesir yang saat ini menjadi ulama terkemuka di Qatar. kedekatan Qatar dan *Ikhwanul Muslimin* ini membuat Arab Saudi marah, karena Arab Saudi menganggap bahwa organisasi tersebut adalah teroris, secara tidak langsung Arab Saudi menuduh Qatar mendukung organisasi teroris dengan menampung tokoh-tokoh *Ikhwanul Muslimin* di negaranya. Faktor yang ketiga adalah, adanya dukungan dari negara-negara di kawasan Timur Tengah seperti UEA, Bahrain dan Mesir yang juga mengikuti jejak Arab Saudi dalam memberlakukan blokade terhadap Qatar.

#### **4.2. Proyeksi Kedepan**

Menurut penulis krisis diplomatik terjadi pada negara-negara anggota GCC ini akan berlangsung lama dan sulit untuk diselesaikan. Sebagaimana diketahui bahwa kedua belah pihak baik Arab Saudi dan Qatar masing-masing tidak mau berkompromi dalam menyelesaikan hal ini, 13 tuntutan yang diajukan Arab Saudi terhadap Qatar sebenarnya merupakan proyeksi Arab Saudi untuk bisa mengintervensi negara tersebut, agar dirinya menjadi satu-satunya negara yang paling besar powernya di Timur Tengah, dan sebagai sebuah negara yang berdaulat, Qatar tentu menolak 13 tuntutan yang diajukan Arab Saudi tersebut. Oleh karena itu, penulis melihat bahwa

keduanya memiliki ego yang tinggi, dan tidak ada yang bersedia untuk mengalah antara satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang menyebabkan penulis beranggapan bahwa krisis diplomatik yang terjadi di Qatar ini akan sangat sulit untuk diselesaikan.

#### **4.3. Saran Penelitian**

Terkait saran penelitian, penulis mengajukan beberapa opsi kepada para analis yang ingin meneliti topik yang sama dengan apa yang dibahas oleh penulis saat ini. Opsi-opsi tersebut antara lain adalah:

- a. Pengkajian secara teoritis terkait bagaimana cara agar krisis diplomatik Qatar ini dapat diselesaikan dengan menggunakan teori resolusi konflik.
- b. Pengkajian terkait perbandingan keadaan Qatar sebelum dan setelah diblokade oleh Arab Saudi secara komprehensif.
- c. Pengkajian terkait kelanjutan dari Krisis Diplomatik Qatar 2017.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiyudh, R. (2018). *Empat Negara Teluk Kecam Laporan PBB terkait Blokade Qatar*. Riyadh: <https://internasional.republika.co.id>.
- AFP. (2017). *Qatar dan Tudingan Ekstremisme Tanpa Akhir*. Jakarta: <https://www.cnnindonesia.com>.
- Al-Jazeera. (2018). *GCC crisis, one year on: What's the impact on Gulf economies?* Doha: <https://www.aljazeera.com>.
- Aminuddin, C. (2018). *Jemaah Qatar dan Suriah Dilarang Haji, Arab Saudi Dikecam*. Jakarta: <https://dunia.tempo.co>.
- Augesti, A. (2018). *Dituduh Larang Warganya Laksanakan Ibadah Haji, Ini Kata Pemerintah Qatar*. Doha: <https://www.liputan6.com>.
- Baabood, A. (2017). Qatar's Resilience Strategy and Implications for State-Society Relations. *Intituto Affari Internazionali*, 2.
- Babood, A. (2017). Oman and the Gulf Diplomatic Crisis. *30 Gulf Affairs*, 1.
- Burchil dan Linklater. (2009). *Teori-Teori Hubungan Internasional (Terjemahan)*. Bandung: Nusa Media.
- Cahyani, S. B. (2019). Faktor-Faktor Manuver Politik Qatar dalam Penguatan Aliansi dengan Iran. *Journal of International Relations*, 519.
- Cherkaoui, T. (2014). Al Jazeera's Changing Editorial Perspectives and the Saudi-Qatari. *The Political Economy of Communication*, 18.
- Coplin, W. D. (2003). *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis Edisi Kedua*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

- Debora, Y. (2017). *Rekam Jejak Retaknya Hubungan Qatar dan GCC*. Doha: <https://tirto.id/>.
- Dennis, E. E. (2018). International Coverage Of Qatar During Blockade. *Northwestern University in Qatar*, 2.
- Dharma, S. (2017). *Qatar Menolak 13 Ultimatum Arab Saudi*. Washington: <https://news.okezone.com>.
- Diwan, K. S. (2018). Kuwait: Finding Balance in a Maximalist Gulf. [www.agsiw.org](http://www.agsiw.org), 2.
- Dorsey, J. M. (2018). Trouble in Sport Paradise: Can Qatar Overcome the Diplomatic Crisis? *Revista Crítica de Ciências Sociais*, 179.
- Dugard and Schabas. (2018). The Blockade of Qatar One Year On: Violations of Human Rights and Coercive Measures. [tgchambers.com](http://tgchambers.com), 8.
- Fadhilah, U. N. (2019). *Buku Baru Ungkap Skandal Qatar, Ikhwanul Muslimin, dan Tariq*. London: <https://internasional.republika.co.id>.
- Ferida, K. (2017). *Merugi Akibat Blokade Arab Saudi Cs, Qatar Akan Tuntut Kompensasi*. Doha: <https://www.liputan6.com>.
- Fernandez, J. M. (2018). The Qatar-Gulf crisis The attack on media freedom and the West's loss of moral authority. *PACIFIC JOURNALISM REVIEW*, 161.
- FT. (2018). *Meski Krisis, Qatar Pacu Persiapan Piala Dunia 2022*. Jakarta: <https://www.voaindonesia.com>.
- Gunawan, R. (2014). *Arab Saudi-Uni Emirat Arab-Bahrain Tarik Dubes dari Qatar*. Doha: <https://www.liputan6.com>.

- Harb, I. K. (2018). Measures Of Stalemate In The Gcc Crisis. *Arab Center Washington DC*, 13.
- haryanto, A. (2017). Blokade Qatar. <http://hiunsoed.id>, 2.
- Jahsan, K. E. (2018). The GCC Crisis at One Year. *Arab Center Washington DC*, 7.
- Jehani, N. A. (2018). The Impact Of The Blockade On Families In Qatar. *Doha International Family Institute.*, 18.
- Jonston, D. L. (2014). Yusuf Qordhowi's Purposive Fiqh: Promoting Or Demoting Role Of The Ulama? *Palgrave Macmillan*, 39.
- Kamrava, M. (2017). Iran-Qatar Relations. *Palgrave Macmillan*, 167.
- Katzman, K. (2019). Qatar: Governance, Security, and U.S. Policy. <https://crsreports.congress.gov>, 9.
- Keatinge, T. (2017). *Mengapa hanya Qatar yang dituduh danai terorisme?* Doha: <https://www.bbc.com/>.
- Kertopati, L. (2017). *Selesaikan Krisis Qatar, AS Susun Kesepakatan Antiterorisme*. Jakarta: <https://www.cnnindonesia.com>.
- Kinninmont, J. (2019). The Gulf Divided The Impact of the Qatar Crisis. *Chatham House*, 5.
- Knell, Y. (2018). *Setahun diboikot oleh negara-negara Teluk, Qatar 'tidak juga tumbang'*. Doha: <https://www.bbc.com>.
- Kristanti, E. Y. (2017). *26-06-1995: Kudeta Tak Berdarah Gulingkan Emir Qatar Pro-Saudi*. Doha: <https://www.liputan6.com>.
- Kucukasci, E. S. (2019). *The Saudi-led blockade won't end anytime soon but Qatar has moved on*. Istanbul: <https://www.trtworld.com>.

- Muliana, V. A. (2017). *Saudi Cs Putuskan Hubungan Diplomatik, Ekonomi Qatar Terguncang*. Jakarta: <https://www.liputan6.com>.
- Negri, A. (2018). Gulf Regional Crisis: Qatar-Saudi Arabia Rivalry, Tensions within the Gulf Cooperation Council. *Italian Institute for International Political Studies*, 244-245.
- Perdana, A. V. (2019). *Qatar Desak Arab Saudi Cabut Pembatasan Haji bagi Warganya*. Doha: <https://internasional.kompas.com>.
- Prastiwi, A. M. (2017). *Akar Permusuhan Arab Saudi dan Qatar Ada Sejak 22 Tahun Lalu*. Doha: <https://www.liputan6.com>.
- Raco, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Roberts, D. B. (2014). Qatar and the Brotherhood. <http://www.tandfonline>, 25-26.
- Saputri, M. (2017). *Negara Arab Ajukan 13 Tuntutan ke Qatar untuk Akhiri Krisis*. Doha: <https://tirto.id/>.
- Susilo, M. (2017). *Seabad lalu miskin, bagaimana Qatar bisa jadi salah satu negara terkaya di dunia?* Doha: <https://www.bbc.com>.
- Toumi, H. (2019). *Oman: No solution in sight for Qatar crisis*. Manama: <https://gulfnews.com>.
- Ulrichsen, K. C. (2014). Qatar And The Arab Spring Policy Drivers and Regional Implications. <https://carnegieendowment.org>, 5.
- Unit, A. R. (2017). Saudi, UAE Demands to End Qatar Crisis: Commands, Diktats, and Ultimatums. *Arab Center Washington DC*, 29.

- Utomo, H. F. (2019). *Iran Sambut Peningkatan Hubungan Baik dengan Qatar di Tengah Konflik Teluk*. Taheran: <https://www.liputan6.com/>.
- Wadrianto, G. K. (2017). *7 Negara Arab Putuskan Hubungan Diplomatik, Ada Apa dengan Qatar?* Doha: <https://internasional.kompas.com>.
- Wardoyo, B. (2018). Rivalitas Saudi-Qatar dan Skenario Krisis Teluk. *Jurnal Hubungan Internasional*, 82-83.
- Widodo, R. I. (2019). *Qatar, Sang Juara di Antara Kepungan Blokade Negara Arab*. Abu Dhabi: <https://www.republika.co.id>.
- Wiegand, K. E. (2012). Bahrain, Qatar, and the Hawar Islands: Resolution of a Gulf Territorial Dispute. *Jstor*, 79.
- Zuhra, W. U. (2017). *Imbas Ekonomi Putusnya Hubungan Diplomatik Saudi- Qatar*. Doha: <https://tirto.id/imbasi-ekonomi>.
- Zulfikar, M. (2014). *Why did the Gulf states withdraw their ambassadors from Qatar?* London: <https://www.middleeastmonitor.com>.
- إسماعيل. (2010). *At-Taarikh Al Aswad Liikhwaanil Muslimin*. [www.elyasi.com](http://www.elyasi.com), 13.
- الأُسرة على طريقي القاصص آثار. (2018). ن. ا. الجهنوي *Qatar Foundation*, 20.
- الملكة فية وقعت فخر. قطر حصار. (2017). ج. ع. بال كحلأء [ال دوحة ال سعودية ال عربية](https://arabi21.com). <https://arabi21.com>.
- "صدمة" تحدث قطر م قاطعة الإز سارية الأثر ار. (2017). ي. حسني *عالم*. Doha: <https://alkhaleejonline.net>.
- تدقق؟ الذي ما قطر م قاطعة على عام بين مرور بعد. (2019). ب. عربي *Doha*: <https://www.bbc.com>.

